

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM AKSESIBILITAS
DUNIA KERJA BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
SMKN 2 KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH

DINDA NUR MAULIDIA

NIM. 220106110033



**PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM AKSESIBILITAS
DUNIA KERJA BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
SMKN 2 KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana (S.Pd)

Diajukan Oleh

Dinda Nur Maulidia

NIM. 220106110033

Dosen Pembimbing

Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D

NIP. 97906022015032001



**PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM AKSESIBILITAS DUNIA KERJA
BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SMKN 2 KOTA MALANG**

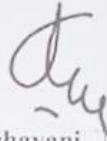
Oleh:

Dinda Nur Maulidia

NIM. 220106110033

Telah diperiksa dan disetujui untuk
dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi

Dosen Pembimbing




Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D

NIP. 197906022015032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D

NIP. 197906022015032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kebijakan Pendidikan Inklusif Dalam Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SMKN 2 Kota Malang” oleh Dinda Nur Maulidia ini telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Maret 2026

Dewan Penguji



Prof. Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd.
NIP.198010012008011016

Ketua (Penguji Utama)



Walid Fajar Antariksa, M. M
NIP.1986112120150310033

Penguji



Ulfah Muhayani M,PP., Ph.D
NIP.197906022015032001

Sekretaris



Ulfah Muhayani M,PP., Ph.D
NIP. 197906022015032001

Dosen Pembimbing

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Muhammad Walid, M.A

NIP. 19730823 200003 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Ulfah Muhayani M,PP., Ph.D

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 12 Maret 2026

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Malang

Assalamualaikum Wr Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali pelaksanaan bimbingan secara tatap muka, baik dari segi bahasa, teknik penulisan, maupun dari segi isi dari penelitian skripsi dari mahasiswa di bawah ini:

Nama : Dinda Nur Maulidia
NIM : 220106110033
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Akseibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang

Oleh karena itu, selaku pembimbing skripsi dari mahasiswa diatas, maka kami berpendapat bahwasanya mahasiswa sudah layak untuk mempertanggungjawabkan penelitian skripsinya dalam siding skripsi. Demikian rekomendasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing



Ulfah Muhayani M,PP., Ph.D
NIP. 197906022015032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Nur Maulidia
NIM : 220106110033
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri, bukan plagiasi dari karya yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain. Adapun pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah dan dicantumkan dalam daftar rujukan. Apabila skripsi ini terdapat unsur plagiasi, Maka saya selaku penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berbeda.

Dengan demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 12 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan



Dinda Nur Maulidia

NIM. 220106110033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

أ = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ذ = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ع = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = ā

Vokal (i) Panjang = ī

Vokal (u) Panjang = ū

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

أو = ū

أي = ī

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

“Allah melebihi batas kemampuannya ”

(Q.S Al – Baqarah : 286)

“Penampilan boleh tertinggal dari mereka yang berada, tetapi isi kepala dan pola pikir tidak boleh tertinggal dari mereka yang berada “

(Dinda Nur Maulidia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Setiap proses yang dilalui dalam penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun penuh pembelajaran, kesabaran, air mata, dan doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan. Karya ini saya persembahkan dengan penuh cinta, hormat, dan ketulusan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sholehuddin dan Ibu Ninis Sugianis yang menjadi alasan terbesar saya untuk terus melangkah. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah bersyarat, doa yang tidak pernah terhenti, dan pengorbanan yang bahkan tidak mampu saya balas dengan apa pun. Setiap keberhasilan kecil yang saya raih hari ini adalah hasil dari didikan, nasihat, dan keteguhan hati yang telah kalian tanamkan sejak saya kecil. Terima kasih karena selalu percaya bahwa saya mampu, bahkan ketika saya sendiri meragukannya. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak tersayang Silvia Khudrotun Nade atas segala dukungan dan keteladanan yang menginspirasi selama proses penulisan tugas akhir ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing Ibu Ulfah Muhayani, MP.P, Ph.D yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Terima kasih atas waktu, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing setiap proses, termasuk dalam setiap revisi yang menjadi bagian dari pembelajaran saya untuk menjadi pribadi yang lebih teliti dan bertanggung jawab secara akademik.

Tak lupa, apresiasi dan terimakasih kepada teman – teman seperjuangan Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022, khususnya kelas D – International Class Program (*Sapy GO & Crazy Rich*) sahabat saya Yuma, Atief, Ibrahim, Mubin, Izza dan Aanisah yang bersama-sama melewati panjangnya proses penelitian, diskusi yang melelahkan namun bermakna, serta momen saling

menguatkan ketika semangat mulai meredup. Teruntuk sahabat terima kasih atas tawa di tengah tekanan, atas motivasi yang sederhana namun menguatkan, dan atas kebersamaan yang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

Terimakasih juga saya sampaikan untuk seluruh informan dan pihak terkait dalam Program Pendidikan Inklusif SMKN 2 Kota Malang yang telah membantu penelitian ini, serta dengan tulus berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tanpa kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan memiliki makna yang utuh.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Untuk setiap malam yang dilalui dengan rasa lelah namun tetap bertahan. Untuk setiap doa yang dipanjatkan dengan harapan agar dimudahkan dan dikuatkan. Terima kasih karena tidak memilih menyerah. Terima kasih karena tetap berjalan meskipun pelan. Terima kasih karena percaya bahwa setiap proses, seberat apa pun, pasti memiliki hikmah.

Skripsi ini bukan sekadar syarat akademik, tetapi simbol perjalanan panjang tentang ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Semoga karya ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih luas, menjadi amal jariyah ilmu yang bermanfaat, serta menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan selalu memiliki makna yang indah di akhirnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat penelitian skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang”. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan *dinul Islam*.

Suatu kebanggaan bagi penulis untuk bisa sampai pada titik ini. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa tidak luput dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Sehingga peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya:

1. Prof. Dr. H. Ilfi Nurdiana, M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Walid, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Ulfah Muhayani, M.PP. Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang penuh perhatian dan telah memberikan waktu, pikiran, dan ilmu untuk membimbing, memotivasi, dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H.Muhammad In'am Esha, M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan, dukungan semangat motivasi dan arahan selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam serta jajaran staf Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan wawasan kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi berkah dan manfaat serta semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam pengabdian. Aamiin

6. Orang Tua penulis yang tercinta Sholehuddin dan Ninis Sugianis Sebagai tempat pulang berkeluh kesah dalam segala riwehnya kehidupan duniawi. Doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses penulisan proposal penelitian ini.
7. Saudara kandung terbaik, Mbak Silfia Khudratun Nade dan Mas Abdul Latif, yang selalu memberikan semangat, nasihat, serta dukungan yang luar biasa.
8. Keponakan tercinta, Nathan Askari Al Eshaq yang selalu membawa kebahagiaan dan warna tersendiri dalam kehidupan penulis. Tawa dan kehadirannya menjadi penyemangat di sela-sela kelelahan menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Miliana Sandy Aulia dan Jihan Firdaus selaku teman dekat peneliti yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan proposal penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman kelas ICP, keluarga serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuannya selama penelitian serta penyelesaian proposal ini.

Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas bantuan, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan kemampuan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya.

Malang, 9 Oktober 2025

Peneliti



Dinda Nur Maulidia

NIM. 220106110033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHASAN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	16
G. Sistematisa Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kajian Teori.....	19
1. Pendidikan Inklusif.....	19
2. Kebijakan Pendidikan Inklusif	26
3. Pendidikan Inklusif Perspektif Islam.....	31
B. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	34
B. Kehadiran Peneliti	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Analisis Data	41
H. Uji Keabsahan Data	44
I. Prosedur Penelitian	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL	47
A. Gambaran Umum	47
B. Hasil Penelitian	52
C. Temuan Penting	90
BAB V PEMBAHASAN	92
A. Bentuk Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Akseibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	92
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Akseibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	106
C. Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Akseibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	112
BAB VI PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 4.1 Diagnosa dan Penanganan	51
Tabel 4.2 Data Peserta Didik Inklusif	53
Tabel 4.2 Hasil Temuan Penelitian	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Medical Models Of Disability</i>	23
Gambar 2.2 <i>Social Models Of Disability</i>	26
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	31
Gambar 3.1 <i>Component of Data Analysis : Interactive Model</i>	42
Gambar 4.1 Struktur Inklusif.....	49
Gambar 4.2 Alur Kebijakan	54
Gambar 4.3 Belajar di Kelas Khusus	63
Gambar 4.4 Pembelajaran di Kelas Reguler	64
Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif	71
Gambar 4.6 Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif	80

ABSTRAK

Maulidia, Dinda Nur 2026. *Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Inklusif, Aksesibilitas Dunia Kerja, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pendidikan inklusif merupakan upaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Pada pendidikan kejuruan, kebijakan inklusif tidak hanya berfokus pada pembelajaran, tetapi juga pada kesiapan peserta didik dalam mengakses dunia kerja. SMKN 2 Kota Malang sebagai sekolah inklusif berupaya mempersiapkan peserta didik berkebutuhan khusus melalui pengembangan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses praktik kerja lapangan dan sarana pendukung.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang, (2) menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja, serta (3) mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru produktif, serta pihak humas sekolah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang diwujudkan melalui penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, penyediaan guru pendamping khusus, pembelajaran vokasional adaptif, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam program praktik kerja lapangan. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan keterampilan, kemandirian, dan pengalaman kerja peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, akses industri, serta sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

ABSTRACT

Maulidia, Dinda Nur 2026. Inclusive Education Policy for Workplace Accessibility for Students with Special Needs at SMKN 2 Malang. Thesis, Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ulfah Muhayani, M.PP., Ph.D.

Keywords: Inclusive Education Policy, Workplace Accessibility, Students with Special Needs.

Inclusive education is an effort to provide equal opportunities for all students, including those with special needs, to obtain a proper education without discrimination. In vocational education, inclusive policies focus not only on learning but also on preparing students to enter the workforce. SMKN 2 Kota Malang, as an inclusive school, strives to prepare students with special needs by developing vocational skills relevant to the needs of the business and industrial worlds, despite facing various challenges such as limited access to field work practice and supporting facilities.

This study aims to: (1) analyze the form of inclusive education policy in workplace accessibility for students with special needs at SMKN 2 Malang City, (2) analyze the implementation of inclusive education policy in workplace accessibility, and (3) identify the impact of this policy on workplace accessibility for students with special needs.

This study uses a qualitative approach with a study case type. Data was obtained through observation, interviews, and documentation with informants consisting of the principal, special assistant teachers, productive teachers, and school public relations officers. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using source triangulation and techniques to ensure data validity.

The results of the study show that the inclusive education policy at SMKN 2 Malang City is realized through the acceptance of students with special needs, the provision of special assistant teachers, adaptive vocational learning, and cooperation with the business world and industry in field work practice programs. The implementation of this policy has a positive impact in the form of increased skills, independence, and work experience for students with special needs. However, there are still obstacles in the form of limited infrastructure, access to industry, and human resources in supporting the implementation of inclusive education.

الملخص

موليديا، دينا نور 2026. سياسة التعليم الشامل لإمكانية الوصول في عالم العمل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في SMKN 2، مدينة مالانغ. أطروحة، برنامج دراسة إدارة التعليم الإسلامي، كلية التربية وتدريب المعلمين، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالان. المشرف: ألفا مهباني، ماجستير في الب، دكتوراه.

الكلمات المفتاحية: سياسة التعليم الشامل، سهولة الوصول إلى عالم العمل، الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

التعليم الشامل هو جهد لتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (ABK)، للحصول على تعليم لائق دون تمييز. في التعليم المهني، لا تركز السياسات الشاملة فقط على التعلم، بل أيضا على استعداد الطلاب للوصول إلى عالم العمل. تسعى مدرسة SMKN 2 مدينة مالانغ كمدرسة شاملة إلى إعداد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير المهارات المهنية ذات الصلة باحتياجات عالم الأعمال والصناعة، رغم أنهم لا يزالون يواجهون تحديات متعددة مثل محدودية الوصول إلى ممارسات العمل الميداني والمرافق الداعمة.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) تحليل شكل سياسة التعليم الشامل في إمكانية الوصول إلى عالم العمل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في SMKN 2 مدينة مالانغ، (2) تحليل تنفيذ سياسات التعليم الشامل في مجال الوصول إلى عالم العمل، و(3) تحديد تأثير هذه السياسات على إمكانية الوصول إلى عالم العمل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع تصميم بحثي قائم على دراسة حالة. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق مع مخبرين شملوا مديري المدارس، والمعلمين المساعدين الخاصين، والمعلمين المنتجين، والعلاقات العامة المدرسية. يتم تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات، وعرض البيانات، ورسم الاستنتاجات باستخدام تثلث المصادر وتقنيات لضمان صحة البيانات.

تظهر نتائج الدراسة أن سياسة التعليم الشامل في SMKN 2 مدينة مالانغ تتحقق من خلال قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير معلمين مساعدين خاصين، والتعلم المهني التكميلي، والتعاون مع عالم الأعمال والعالم الصناعي في برامج ممارسة العمل الميداني. تطبيق هذه السياسة له تأثير إيجابي من خلال تحسين مهارات واستقلالية وخبرة العمل لدى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات في شكل البنية التحتية المحدودة، والوصول إلى الصناعة، والموارد البشرية في دعم تنفيذ التعليم الشامل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. Kehadiran mereka dalam sistem pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih adil tanpa diskriminasi melalui pendidikan inklusif. Menurut Jurnal Internasional *“Inclusive education is the practice of educating all students, including those with disabilities, in general education classrooms with appropriate supports and services”* yang berarti pendidikan inklusif adalah praktik mendidik semua siswa, termasuk yang memiliki disabilitas, di ruang kelas reguler dengan dukungan dan layanan yang sesuai.¹ Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama peserta didik reguler dalam satu lingkungan yang sama. Konsep ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” berdasarkan ayat tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan peluang untuk

¹ Emile Monono Mbua, ‘Principal Leadership: Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education’, *American Journal of Education and Practice*, 7.1 (2023), pp. 1–25, doi:10.47672/ajep.1313.

² Endry Setiawan and others, ‘Pemerataan Akses Pendidikan’, *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2.4 (2024).

memperoleh pendidikan, disebutkan pula dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.³

Pendidikan inklusi di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sekarang telah memiliki landasan yuridis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009. Menurut permendiknas no 70 tahun 2009 pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁴ Namun, dalam implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi pendidik dalam menghadapi keberagaman kelas, minimnya fasilitas pendukung, serta keterbatasan akses bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam memasuki dunia kerja yang setara dan berkeadilan.

SMKN 2 Kota Malang ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun 2010. SMKN 2 Kota Malang ditunjuk oleh dinas

³ MKRI, 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', 105.3 (1945), pp. 129–33<<https://webcache.googleusercontent.com>

⁴ permendiknas, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa', 2009, p. 19.

pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.⁵ Dalam penyelenggaraannya peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 2 Kota Malang menghadapi perubahan yang cukup kompleks dalam mengikuti pendidikan kejuruan. Sebagai sekolah yang telah menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui kebijakan pendidikan inklusif, SMKN 2 Kota Malang berupaya memberikan layanan yang sama seperti peserta didik reguler. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah hambatan salah satu yang paling penting adalah ketika peserta didik melakukan praktik kerja industri serta aksesibilitas terhadap dunia kerja. Banyak peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh kesempatan magang atau diterima di industri karena masih adanya stigma negatif terkait kemampuan mereka. Dunia usaha dan dunia industri sering kali ragu untuk memberikan kesempatan, karena beranggapan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus tidak mampu mencapai target produktivitas yang sama dengan peserta didik reguler. Akibatnya, lulusan Anak Berkebutuhan Khusus dari SMK masih menghadapi hambatan serius untuk bisa mandiri secara ekonomi pasca sekolah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di tingkat SMK terletak pada kesiapan internal sekolah serta rendahnya kolaborasi dengan pihak eksternal, khususnya dunia industri yang seharusnya menjadi mitra dalam penyiapan keterampilan vokasional siswa.⁶ Selain itu, anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan

⁵ Alya Rosa Wildenowi, *Efektivitas Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi Covid 19*, 2021, XIX.

⁶ Anna Ata and others, 'Embracing Diversity and Inclusion in Indonesian Schools: Challenges and Policy Options for the Future of Inclusive Education', *The World Bank*, 2021, pp. 1–51.

dukungan tambahan berupa pelatihan keterampilan yang lebih adaptif dan program transisi yang menjembatani sekolah dengan dunia kerja agar mereka memiliki peluang karier yang lebih baik.⁷ Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak boleh sebatas pada tahap penerimaan peserta didik, tetapi juga harus mencakup fasilitasi dalam memperoleh akses kerja melalui kemitraan atau kerja sama sekolah dan industri untuk program magang serta peran masyarakat dalam memperluas akses pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.⁸ Stigma ini kemudian diperkuat dengan integrasi pendidikan inklusif dalam capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin 4 tentang pendidikan berkualitas dan poin 8 tentang pekerjaan layak.⁹ Namun, dalam implementasi masih terjadi gap antara idealitas kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Fakta ini diperkuat oleh survei yang dilakukan UNICEF dikutip oleh Nurul Asikin menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak penyandang disabilitas di Indonesia termasuk tunarungu, mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi relevan untuk karier mereka.¹⁰

⁷ Tri Setiyarini and Ade Gafar Abdullah, 'Approaches to Training People with Disability in Mainstream Vocational Training Centers', *Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education (ICIEVE 2021)*, 651. Icieve 2021 (2022), pp. 62–68, doi:10.2991/assehr.k.220305.013.

⁸ Kemendikbud Ristek, 'Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif', *Kepala Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2022, pp. 1–44 <<https://kurikulum.kemdikbud.go.id>>

⁹ SDGs Indonesia, 'Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)', 2015 <<https://sdgs.bappenas.go.id/>>.

¹⁰ Nurul Asikin, *Penerapan Metode Experiential Learning Berbasis Scans Untuk Meningkatkan Kemampuan Eksplorasi Karier Siswa Tunarungu Di Slbn 1 Makassar Application*, Skripsi, 2025, XI <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>>

Literatur internasional juga menunjukkan kecenderungan serupa. Penelitian oleh UNESCO (2020) menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dalam konteks vokasi sangat ditentukan oleh kemitraan antara sekolah dan industri. Tanpa adanya kolaborasi antara sekolah, industri dan masyarakat, peserta didik berkebutuhan khusus berisiko hanya menjadi lulusan yang terbatas peluangnya dari dunia kerja, meskipun telah menempuh pendidikan kejuruan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi SMKN 2 Kota Malang mencerminkan persoalan yang lebih luas, yakni keterbatasan akses ABK terhadap dunia kerja meskipun kebijakan pendidikan inklusif sudah berjalan lebih dari satu dekade.

Berdasarkan fakta fenomena, masalah, dan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang diimplementasikan dalam konteks aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka dengan itu peneliti memberikan rumusan penelitian dengan judul “ Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menarik untuk meneliti dengan fokus penelitian:

1. Bagaimana bentuk kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang?

2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang?
3. Bagaimana dampak kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang.
3. Untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan penambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta dijadikan referensi terkait kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkubutuhan khusus dilingkup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan penelitian terdahulu kepada peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga pendidikan SMK

Bagi lembaga pendidikan SMK, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan memperbaiki strategi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam mendukung peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh akses dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong sekolah untuk memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan inklusif memiliki kesempatan kerja yang setara dengan peserta didik reguler.

b. Bagi Dinas Pendidikan

Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan maupun menyempurnakan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat daerah. Temuan penelitian akan memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program pendukung yang lebih relevan dan tepat sasaran.

c. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan studi lanjutan mengenai kebijakan pendidikan inklusif dan aksesibilitas dunia kerja, baik melalui penelitian komparatif di sekolah lain maupun kajian yang lebih mendalam pada jenjang pendidikan yang berbeda.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan upgrade pengetahuan serta pengalaman empiris terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif di lapangan, sekaligus melatih kemampuan analisis kritis dan penulisan ilmiah.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini juga mengacu kepada beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian tersebut memiliki tema yang hampir sama dengan apa yang akan saya teliti yaitu kebijakan pendidikan inklusif, adapun beberapa kajian dari penelitian terdahulu yang ada dipenelitian ini adalah sebagai berikut

1. Skripsi¹¹ (**Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Malang**) oleh Muhammad Iqbal Alfiansyah Tahun 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang sebagai bentuk pemenuhan hak

¹¹ M I Alfiansyah, 'Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Malang', 2019 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/>>

pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan penelitian ini menyoroti perencanaan, implementasi, serta dampak dari pendidikan inklusif, meliputi aspek kurikulum, guru pendamping khusus, serta sarana prasarana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SMKN 2 Kota Malang mengimplementasikan pendidikan inklusi serta dampaknya terhadap siswa, sekolah, dan masyarakat.

2. Tesis¹² (**Model Pendidikan Inklusif dalam Upaya Menyiapkan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagai Calon Pendidik Profesional (Studi Kasus di Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)** Ahmad Mikail Tahun 2021

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas serta adanya stigma bahwa mereka tidak layak menjadi pendidik profesional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus di Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman. Pembahasan penelitian ini menekankan pada implementasi model pendidikan inklusif di perguruan tinggi, meliputi kebijakan afirmatif, program pendukung, serta strategi layanan yang diberikan bagi mahasiswa disabilitas untuk menyiapkan mereka sebagai calon pendidik profesional. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan

¹² ahmad Mikail, 'Model Pendidikan Inklusif Dalam Upaya Menyiapkan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Pendidik Profesional (Studi', 3.5 (2021), p. 6.

secara komprehensif bagaimana model pendidikan inklusif di perguruan tinggi Islam dapat mendukung mahasiswa penyandang disabilitas agar mampu bersaing secara profesional di dunia pendidikan .

3. Jurnal¹³ (**Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA di Surabaya**) Achmad Nur Taufik & Tjitjik Rahayu tahun 2021

Penelitian ini berangkat dari permasalahan masih belum meratanya kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Surabaya meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah lama berlaku. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan. Pembahasan menggunakan teori *Van Metter* dan *Van Horn*, menekankan pada enam variabel seperti standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Surabaya dan menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kesetaraan belajar.

4. Jurnal¹⁴ (**Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Inklusif dalam Pendidikan Umum: Tinjauan Literatur Terbaru**) Ignatius Septo Pramesworo, Muhammad Ni'amul Hanif, Yeyen Herlina Tahun 2025

¹³ Tjitjik Rahaju Achmad Nur Taufik, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Mewujudkan Sma Di Surabaya', *Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 2021, pp. 139–54.

¹⁴ Ignatius Septo Pramesworo, Muhammad Ni'amul Hanif, and Yeyen Herlina, 'Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Inklusif Dalam Pendidikan Umum: Tinjauan Literatur Terbaru', *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11.1 (2025), pp. 1–9.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kajian terbaru mengenai efektivitas pendekatan pembelajaran inklusif dalam sistem pendidikan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (*literature review*). Pembahasan menekankan pada efektivitas inklusi dalam meningkatkan akses, partisipasi, prestasi akademik, dan perkembangan sosial-emosional, serta peran guru, fasilitas, orang tua, dan komunitas dalam keberhasilan implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pembelajaran inklusif serta menyusun rekomendasi strategis bagi kebijakan dan praktik pendidikan.

5. Jurnal¹⁵ (**Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan terhadap Akses Pekerjaan**) Yani Fathur Rohman Tahun 2019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena eksklusi sosial yang dialami penyandang disabilitas penglihatan, terutama dalam akses dunia kerja yang masih terbatas akibat stigma dan hambatan struktural. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Pembahasan menguraikan dua bentuk eksklusi yaitu eksklusi budaya (stigma masyarakat) dan eksklusi struktural (regulasi, fasilitas, serta kesempatan kerja yang terbatas). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk eksklusi sosial terhadap penyandang disabilitas penglihatan serta menunjukkan pentingnya kebijakan dan dukungan struktural dalam meningkatkan aksesibilitas kerja.

¹⁵ Yani Fathur Rohman, 'Eksklusi Sosial Dan Penyandang Penglihatan Akses Pekerjaan', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01.01 (2019), pp. 51–66

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul, Bentuk, Penerbit, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Iqbal Alfiansyah, Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Malang, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Penelitian ini sama meneliti SMKN 2 Malang dan fokus pada implementasi pendidikan inklusif.	Fokus pada implementasi pendidikan inklusif di sekolah (proses, kurikulum, guru, sarpras), belum menyentuh akses dunia kerja.	Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini menekankan dinamika internal sekolah seperti kurikulum, guru pendamping, dan sarana prasarana, tetapi belum menyentuh pada bagian aksesibilitas dunia kerja

				bagi lulusan ABK.
2.	Ahmad Mikail, Model Pendidikan Inklusif dalam Upaya Menyiapkan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagai Calon Pendidik Profesional (Studi Kasus di Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	Penelitian ini sama membahas pendidikan inklusif serta kaitannya dengan kesiapan peserta didik berkebutuhan khusus menuju profesionalisme/masa depan.	Fokus pada pendidikan inklusif di perguruan tinggi (UIN Sunan Kalijaga) dan menyiapkan mahasiswa disabilitas sebagai pendidik, bukan di SMK dan bukan pada akses kerja lulusan ABK.	Orisinalitas penelitian ini terletak pada kajiannya mengenai model pendidikan inklusif di perguruan tinggi Islam, dengan fokus bagaimana Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga menyiapkan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai calon pendidik profesional melalui kebijakan afirmatif, program layanan inklusif, dan strategi pendukung pembelajaran.
3.	Achmad Nur Taufik & Tjitjik Rahaju, Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA	Penelitian ini sama fokus pada kebijakan pendidikan inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus (ABK).	Fokus pada SMA Surabaya dan kesetaraan belajar, bukan akses kerja lulusan ABK.	Penelitian ini orisinal karena mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat SMA Surabaya dengan fokus pada kesetaraan belajar bagi PDBK

	di Surabaya, Jurnal Publika Universitas Negeri Surabaya, 2021			(Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). Keunikannya terletak pada analisis menggunakan teori Van Metter & Van Horn, meski penelitian ini belum menyinggung aspek kesiapan lulusan dalam dunia kerja.
4.	Ignatius Septo Pramesworo, Muhammad Ni'amul Hanif, Yeyen Herlina, Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Inklusif dalam Pendidikan Umum: Tinjauan Literatur Terbaru, Jurnal Ilmiah Edukatif, 2025	Penelitian ini sama meneliti efektivitas pendekatan pembelajaran inklusif.	Tinjauan literatur global tentang efektivitas inklusi, tidak kontekstual di SMK atau akses kerja ABK.	Orisinalitas penelitian ini adalah memberikan tinjauan literatur terbaru mengenai efektivitas pembelajaran inklusif dalam pendidikan umum dengan pendekatan <i>Universal Design for Learning</i> (UDL). Penelitian ini bersifat konseptual dan luas, berbeda dengan penelitian lapangan, serta tidak mengkaji secara

				spesifik konteks SMK atau transisi ke dunia kerja.
5.	Yani Fathur Rohman, Eksklusi Sosial dan Tantangan Penyandang Disabilitas Penglihatan terhadap Akses Pekerjaan, Indonesian <i>Journal of Religion and Society</i> , 2019	Penelitian ini sama menyoroti isu aksesibilitas dunia kerja penyandang disabilitas.	Fokus pada eksklusi sosial dan disabilitas penglihatan dalam dunia kerja secara umum, tidak membahas kebijakan pendidikan inklusif di sekolah vokasi.	Orisinalitas penelitian ini ada pada fokusnya terhadap eksistensi eksklusi sosial yang dialami penyandang disabilitas penglihatan dalam akses pekerjaan, melalui analisis multidimensi antara eksklusi budaya dan struktural. Keunikannya adalah menyoroti tantangan kerja disabilitas dari perspektif sosial-struktural, bukan dari perspektif pendidikan formal.

Dari ulasan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti secara tegas dalam penelitiannya murni belum ada penelitian sebelumnya yang membahas pada hal yang sama persis serta tidak ada plagiasi yang peneliti lakukan.

F. Definisi Itilah

1. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif adalah aturan, keputusan, atau program yang dirumuskan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang setara, ramah, dan tanpa diskriminasi bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.

2. Aksesibilitas Dunia Kerja

Aksesibilitas dunia kerja adalah kemudahan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap individu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, untuk memperoleh, memasuki, dan berpartisipasi dalam lingkungan kerja tanpa hambatan diskriminatif.

3. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Peserta didik berkebutuhan khusus adalah siswa yang memiliki perbedaan tertentu dalam aspek fisik, intelektual, maupun emosional namun tetap berhak memperoleh layanan pendidikan yang setara dalam sistem pendidikan inklusif bersama peserta didik lainnya tanpa diskriminasi.

G. Sistematika Penulisan

Pada proses penelitian agar dapat memudahkan penggambaran secara *general* perlu disertakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab 1 Latar Belakang Masalah

Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik

berkebutuhan khusus serta peneliti menyampaikan latar belakang penelitian, pembatasan masalah atau konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika penulisan.

2. Bab 2 Kajian Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Teori yang digunakan dapat dijadikan sebagai pembimbing, pengarah, dan penyokong penelitian ini perihal kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan, dan prosedur yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Malang.

4. Bab 4 Data dan Hasil Penelitian

Bab ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan metode yang telah diuraikan dalam BAB III. Bagian presentasi data mengandung penjelasan deskriptif mengenai variabel penelitian yang disajikan secara terperinci dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami inti dari penelitian tersebut.

5. Bab 5 Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian dan menginterpretasikan temuan dengan

menganalisis data untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki sifat objektif.

6. Bab 6 Kesimpulan

Dalam bab ini, disampaikan rangkuman kesimpulan dari seluruh proses penelitian dengan menguraikan hasil penelitian secara singkat dan memberikan saran dari peneliti kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Inklusif

b. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memberi peluang kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau potensi luar biasa untuk belajar bersama di lingkungan sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya. Konsep ini berupaya mengubah sistem pendidikan agar bebas dari segala hambatan yang dapat membatasi keterlibatan siswa secara penuh, serta didukung oleh berbagai layanan pendamping yang memastikan semua siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu.¹⁶ Pendidikan inklusif juga merupakan suatu sistem pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah bersama teman-teman lainnya di sekolah reguler.¹⁷

Menurut permendiknas tahun 2009 “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama

¹⁶ Nursyamsudin and Suyudi Suhartono, ‘Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sma’, *Direktorat Sekolah Menengah Atas*, 2021, p. 36 <<https://www.slideshare.net>

¹⁷ Dhea Aulianida, Siani Indria Liestyasari, and Siti Rochani Ch, ‘Pendidikan Inklusif Dan Difabel Pembelajaran PAI’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99.

dengan peserta didik pada umumnya.”¹⁸ Pendidikan inklusif menurut UNESCO yang dikutip oleh Stubbs Sue adalah suatu proses yang bertujuan memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik dengan cara memperluas partisipasi mereka dalam kegiatan belajar dan kehidupan sekolah. Dalam pendekatan ini, sekolah berupaya menghapus segala bentuk hambatan atau diskriminasi agar setiap anak dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan tanpa terkecuali.¹⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu sistem dan pendekatan pendidikan yang menempatkan semua peserta didik baik yang memiliki kebutuhan khusus, potensi luar biasa, maupun peserta didik pada umumnya dalam satu lingkungan belajar yang sama dengan kesempatan yang setara. Dengan demikian, pendidikan inklusif bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang adil, partisipatif, dan menghargai perbedaan, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

1.) Medical Model of Disability

Model medis merupakan salah satu model lama tahun 1960an dalam memandang dan menggambarkan disabilitas. Dalam model ini, profesional medis berusaha mencari cara untuk mengatasi atau menyembuhkan kondisi disabilitas, karena dianggap bahwa masalah

¹⁸ permendiknas, ‘Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa’.

¹⁹ Sue Stubbs, ‘Inclusive Education Where There Are Few Resources’, *The Atlas Alliance*, 2008, pp. 1–138

utama berasal dari penyakit atau gangguan dalam diri individu.²⁰ Adapun kondisi disabilitas yang disebutkan melibatkan gangguan fungsi pada satu atau lebih dari tingkat-tingkat tersebut, yaitu gangguan fungsi tubuh (*impairments*), keterbatasan aktivitas (*activity limitations*), dan pembatasan partisipasi (*participation restrictions*).

Pendekatan ini berfokus pada penyembuhan dan perbaikan fungsi fisik, bukan pada perubahan lingkungan atau sistem sosial agar lebih inklusif.²¹ Dalam buku “*Evaluation of IIEP/UNICEF Online Course: Foundations of Disability-Inclusive Education Sector Planning (South Asia)*” (2022) yaitu “*While the 2013 IE policy represented an important achievement towards inclusive education in the country, the policy’s language still implied a medical model of disability, designating children with special needs into distinct categories rather than adopting inclusive education practices for all children.*”²² menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusif model medis disabilitas merupakan anak-anak dengan kebutuhan khusus yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dan dipisahkan dari sistem pendidikan umum. Pendekatan ini berfokus pada kondisi individu (penyakit atau keterbatasan fisik) alih-alih menyesuaikan sistem pendidikan agar inklusif bagi semua anak. Dalam pendapat lain *medical model of disability* adalah pendekatan yang telah

²⁰ WHO, ‘Towards a Common Language for Functioning , Disability and Health ICF’, *International Classification*, 1149 (2002), pp. 1–22 <<http://www.who.int>

²¹ UNESCO, ‘Training Manual For Meaningful Inclusion of Person With Disabilities’, *UNESCO Cluster Office For the Carribean, United Nations House*, no. October (2021).

²² Hannah Maddrey, ‘Evaluation of IIEP/UNICEF Online Course: “Foundations of Disability-Inclusive Education Sector Planning” South Asia’, no. May (2022), pp. 1–56.

mendominasi sejak tahun 1800-an dan memandang disabilitas sebagai abnormalitas tubuh atau pikiran yang harus disembuhkan atau dihilangkan.²³ Model ini berfokus pada upaya medis untuk membuat tubuh dan otak penyandang disabilitas menyesuaikan diri dengan standar masyarakat tentang “normalitas atau dianggap normal”.

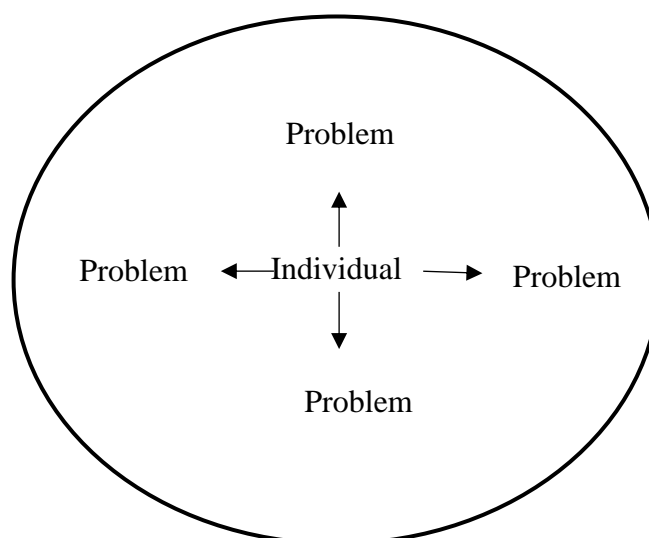
Dalam praktiknya, model ini menempatkan tanggung jawab perubahan sepenuhnya pada individu dan menganggap penyandang disabilitas sebagai masalah yang perlu diperbaiki. Zaks mengatakan bahwa cara berpikir ini bisa menyakiti dan menekan penyandang disabilitas, karena memaksa mereka menyesuaikan diri dengan standar masyarakat. Dalam sudut pandang lain model medis disabilitas memandang bahwa seseorang tidak bisa berpartisipasi di masyarakat karena masalah pada tubuh atau pikirannya sendiri.²⁴ Jadi, penyebab utama disabilitas dianggap berasal dari dalam diri orang itu, bukan dari lingkungan sekitarnya. Solusinya pun berfokus pada mengobati atau memperbaiki orang tersebut, misalnya lewat perawatan khusus atau layanan medis. Dalam model ini, orang dengan disabilitas sering dianggap sebagai penerima bantuan, bukan sebagai bagian masyarakat yang setara.

Berdasarkan kajian di atas *model medis disabilitas* menempatkan disabilitas sebagai masalah individu yang disebabkan oleh gangguan

²³ Zosia Zaks, ‘Changing the Medical Model of Disability to the Normalization Model of Disability: Clarifying the Past to Create a New Future Direction’, *Disability and Society*, 39.12 (2024), pp. 3233–60, doi:10.1080/09687599.2023.2255926.

²⁴ Parliamentary and Health Service Ombudsman, ‘Introduction to the Social and Medical Models of Disability’, 2023, p. 4 <<http://www.ombudsman.org.uk>

atau kelemahan fisik dan mental. Dalam pandangan ini, penyandang disabilitas dianggap “tidak normal” dan perlu diperbaiki melalui upaya medis agar dapat menyesuaikan diri dengan standar masyarakat. Fokus model ini bukan pada perubahan lingkungan atau sistem sosial, melainkan pada usaha mengubah individu agar dapat berfungsi seperti orang lain yang dianggap “normal”. Pendekatan ini sering kali melahirkan kebijakan yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari sistem pendidikan umum, di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus dikelompokkan dalam kategori tertentu alih-alih diterapkan pendidikan inklusif bagi semua.



Gambar 2.1 Medical Models Of Disability

2.) Social Model of Disability

Dalam model sosial yang muncul tahun 1990 oleh Profesor Mike Oliver, disabilitas tidak dianggap sebagai masalah yang melekat pada individu, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan berbagai hambatan sosial, ekonomi,

lingkungan, dan sikap masyarakat.²⁵ Artinya, seseorang menjadi “*disable*” bukan karena kondisi fisik atau mentalnya semata, tetapi karena masyarakat dan lingkungan tidak menyediakan akses dan dukungan yang memadai untuk memungkinkan partisipasi yang setara.²⁶ Sedangkan menurut James M Kauffman model ini bukan disebabkan oleh tubuh seseorang, melainkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menciptakan hambatan terhadap partisipasi penuh dalam masyarakat.²⁷ Tokoh-tokoh seperti Mike Oliver dan Colin Barnes mengembangkan argumen bahwa “*disability is not a product of bodily pathology but of specific social and economic structures*” disabilitas adalah hasil dari organisasi sosial yang tidak menyediakan akses dan layanan yang sesuai bagi penyandang disabilitas.

Model sosial ini lahir sebagai reaksi terhadap model medis, yang memandang disabilitas sebagai kelainan atau kekurangan pada tubuh yang harus “diperbaiki” melalui upaya medis atau terapi. Sebaliknya, model sosial beranggapan bahwa masyarakatlah yang membuat individu menjadi “*disable*”, karena tidak menyediakan sarana, aturan, atau sikap yang mendukung partisipasi setara bagi semua orang.²⁸ Model ini menegaskan

²⁵ M Oliver, *The Politics of Disablement* (Macmillan, 1990).

²⁶ UNESCO, ‘Training Manual For Meaningful Inclusion of Person With Disabilities’.

²⁷ Dimitris Anastasiou and James M. Kauffman, ‘The Social Model of Disability: Dichotomy between Impairment and Disability’, *Journal of Medicine and Philosophy (United Kingdom)*, 38.4 (2013), pp. 441–59, doi:10.1093/jmp/jht026.

²⁸ Frida Kusumastuti, ‘The Application of Social Model for Handling Communication of Children With Autism’, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11.2 (2022), pp. 103–11, doi:10.14710/interaksi.11.2.103-111.

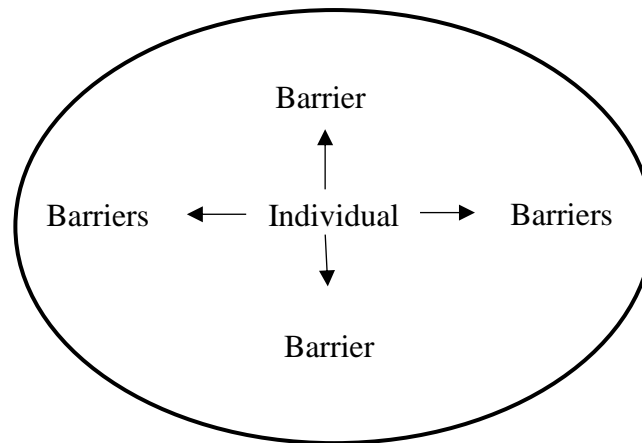
bahwa penyebab utama ketidaksetaraan bukanlah “keterbatasan” individu, tetapi struktur sosial yang diskriminatif dan tidak inklusif. Sedangkan menurut collins model ini menekankan bahwa seseorang menjadi “*disable*” bukan karena kondisi fisik atau mentalnya, tetapi karena hambatan (*barriers*) yang diciptakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya.²⁹ Jenis- jenis hambatan yang dikenali dalam model sosial disabilitas sebagai berikut:³⁰

- a) *Attitudinal barriers* (hambatan sikap) : prasangka, diskriminasi, dan pandangan negatif masyarakat.
- b) *Environmental barrier* (hambatan lingkungan): infrastruktur yang tidak aksesibel, seperti tangga tanpa ramp.
- c) *Institutional barriers* (hambatan kelembagaan): kebijakan atau system yang tidak adil, seperti transportasi umum yang tidak aksesibel atau aturan kerja yang tidak memberikan penyesuaian bagi disabilitas.

²⁹ C Collins, ‘Medical Model VS Social Model of Disability’, *Canadian Nursing Home*, 7.3 (2024), pp. 17–20.

³⁰ Collins, ‘Medical Model VS Social Model of Disability’.

- d) *Communication barriers* (hambatan komunikasi): kurangnya teks Braille terjemahan bahasa isyarat, atau bahasa yang sulit dipahami.



Gambar 2.2 Social Models Of Disability

2. Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Konsep dan Landasan Teoretis Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Aksesibilitas Dunia Kerja

Menurut UNESCO (2009) dalam *Policy Guidelines on Inclusion in Education*, kebijakan pendidikan inklusif adalah kebijakan yang memastikan seluruh anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisi pribadi, memiliki akses terhadap pendidikan bermutu di lingkungan sekolah reguler dengan dukungan yang memadai.³¹ Kebijakan ini mencerminkan perubahan paradigma dari segregasi menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan setara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

³¹ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education', 17 (2009), p. 302.

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, sedangkan mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.³² Dengan demikian, kebijakan inklusif merupakan strategi pemerataan layanan pendidikan berbasis hak asasi manusia yang sejalan dengan arah kebijakan global UNESCO tentang *Education for All* dan *Sustainable Development Goals (SDG)*.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, teori Ecological Systems Theory oleh Urie Bronfenbrenner (1979) relevan untuk memahami implementasi kebijakan. Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi berbagai sistem, mulai dari *microsystem* (guru, keluarga, teman sebaya) hingga *macrosystem* (kebijakan nasional dan budaya sosial).³³ Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk kesiapan kerja tidak hanya bergantung pada guru atau sekolah, tetapi juga dukungan lintas sektor seperti pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat sekitar.

Selain itu, teori Transition-to-Work yang dikembangkan oleh Peter Wehman (2006) menjelaskan bahwa proses transisi peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengenalan karier, pelatihan vokasional, magang, serta dukungan pekerjaan (*job coaching*).³⁴ Implementasi kebijakan yang efektif harus

³² Permendiknas, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa'.

³³ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (Harvard University Press, 1979).

³⁴ P. Wehman, 'Transition from School to Work: New Challenges and Goals for Rehabilitation', *Rehabilitation Counseling Bulletin*, 49(4) (2006), pp. 175–178.

mencakup kerja sama antara sekolah, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja agar peserta didik memperoleh pengalaman kerja yang relevan dan berkesinambungan.

b. Landasan hukum pendidikan inklusif di Indonesia

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia berakar kuat pada peraturan perundang-undangan nasional yang menegaskan prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan hak dalam pendidikan. Beberapa regulasi utama meliputi:

- 1.) Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.³⁵
- 2.) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 129 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada setiap jenjang pendidikan.³⁶
- 3.) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. kebijakan terbaru ini memperluas pendidikan inklusif dengan mewajibkan setiap sekolah formal menerima peserta didik penyandang disabilitas; menyediakan akomodasi yang layak dan pendampingan individual; menyusun

³⁵ Permendiknas, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa'.

³⁶ peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, 'Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan', 9.1 (2010), pp. 76–99.

rencana pembelajaran individual (RPI); menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel serta pelatihan guru.³⁷

- 4.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Komite Disabilitas Daerah, yang memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga sosial untuk memastikan implementasi kebijakan inklusi berjalan efektif.³⁸
- 5.) *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, tujuan utama pendidikan inklusif bukan hanya memberikan kesempatan belajar di sekolah reguler, tetapi juga menyiapkan peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat dan dunia kerja.³⁹

c. Kebijakan Internasional Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan bentuk tanggung jawab negara dan lembaga pendidikan dalam menjamin hak semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan akses terhadap dunia kerja. Menurut United Nations (2006) dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, setiap negara wajib mengembangkan sistem pendidikan inklusif di semua jenjang yang mendukung pengembangan potensi, partisipasi penuh, serta kesiapan peserta didik berkebutuhan khusus untuk hidup mandiri dan bekerja secara bermartabat. Prinsip-prinsip utama CRPD meliputi non-

³⁷ Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, 'Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi', *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3.1 (2023), p. 7, doi:10.35473/ijec.v3i1.828.

³⁸ perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021, 'Penyandang Disabilitas', 3.5 (2021), p. 6.

³⁹ kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 'Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif'.

diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, dan *reasonable accommodation*, yang menjadi fondasi setiap kebijakan pendidikan inklusif di tingkat nasional maupun satuan pendidikan.⁴⁰ Selain itu, UNESCO (2020) dalam *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All* menegaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusif harus bersifat sistemik dan berorientasi pada reformasi seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, pelatihan guru, hingga kemitraan dengan dunia kerja.⁴¹ Kebijakan tersebut perlu memuat mekanisme dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam memperoleh life skills dan vocational skills agar siap memasuki dunia kerja yang setara dan berkeadilan

Dengan demikian, bentuk kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah, seperti di SMKN 2 Kota Malang, dapat dilihat dari adanya regulasi, program vokasi inklusif, perencanaan individual (*Individualized Education Plan*), serta kerja sama dengan pihak industri untuk mendukung transisi kerja.

3. Pendidikan Inklusif menurut Perspektif Islam

Islam menempatkan seluruh manusia sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah, tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, maupun asal-usulnya. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada hakikatnya memberikan ruang kepada

⁴⁰ UNITED NATIONS, '10 Years of Convention on the Rights of Persons With Disabilities', *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 35.3 (2017), pp. 152–57, doi:10.1177/0924051917722294.

⁴¹ UNESCO, *Inclusion and Education All Means All, Inclusive Education Across Cultures: Crossing Boundaries, Sharing Ideas*, 2020.

setiap individu, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama sesuai potensi masing-masing.

Hal ini selaras dengan Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّكَ نُحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Dalam ayat diatas menegaskan bahwa Allah yang membagikan karunia dan kemampuan kepada setiap manusia secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan untuk dijadikan alasan diskriminasi, melainkan sebagai bentuk ketetapan Allah agar manusia saling melengkapi dan memanfaatkan keberagaman tersebut untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, keberagaman kemampuan peserta didik baik fisik, mental, maupun kognitif merupakan sunnatullah yang harus diterima dan dihargai dalam sistem pendidikan. Ayat ini kemudian diperkuat dengan Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 , Allah berfirman:

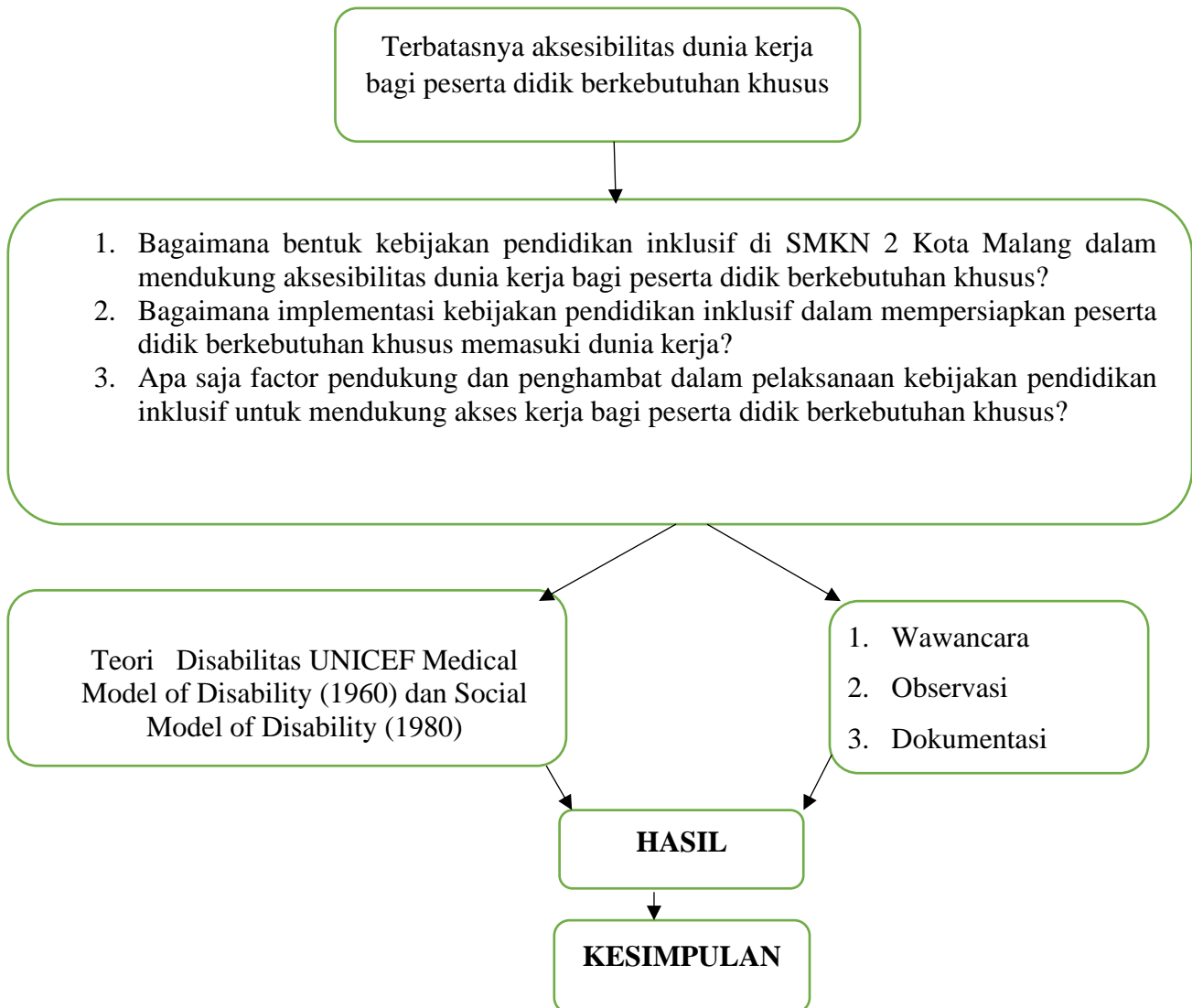
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (li ta‘ārafū). Prinsip kesetaraan dan

penghargaan terhadap keragaman ini menjadi dasar moral bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang dan kondisi disabilitasnya, berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Ayat ini menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan atau meminggirkan kelompok tertentu, termasuk dalam konteks pendidikan. Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memandang pendidikan inklusif sebagai bentuk pengamalan nilai tauhid, keadilan, kemanusiaan, dan rahmatan lil ‘alamin. Allah menciptakan manusia dengan perbedaan sebagai tanda kekuasaan-Nya, dan pendidikan bertugas memastikan bahwa setiap individu dapat berkembang sesuai potensinya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi juga bagian dari implementasi ajaran Islam tentang penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

B. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk, implementasi serta dampak dari kebijakan pendidikan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang terhadap kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti turun langsung ke lapangan penelitian untuk melakukan wawancara dan observasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah, seperti kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru produktif, serta peserta didik berkebutuhan khusus, guna memperoleh data yang akurat dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell yang dikutip oleh Raco, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral melalui wawancara, observasi, serta analisis teks yang menghasilkan deskripsi atau tema-tema yang merefleksikan makna mendalam dari pengalaman partisipan.⁴² Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna mendalam di balik fenomena kebijakan pendidikan inklusif serta dinamika pelaksanaannya di lingkungan sekolah kejuruan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara alami situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan melalui kajian deskriptif yang mendalam.

⁴² Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya (Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc.)', 2010, pp. 1–145.

Jenis yang digunakan adalah studi kasus. Mudjia Rahrjo menjelaskan bahawa studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu peristiwa, program, atau aktivitas pada individu, kelompok, maupun lembaga, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena aktual yang sedang berlangsung.⁴³ Oleh karena itu, rancangan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang mendukung aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menemukan makna dan pola yang muncul dari praktik kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah peneliti hadir secara langsung di lapangan, berperan sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data, sehingga kehadirannya menjadi bagian penting dalam proses penelitian.⁴⁴ Adapun peran peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Awal (Pra-Lapangan)

Sebelum memasuki tahap penelitian lapangan, peneliti melakukan observasi awal atau survei di lokasi penelitian yaitu, SMKN 2 Kota Malang

⁴³ Mudjia Rahardjo, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 3.1 (2017), p. 43 <<http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503>

⁴⁴ Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, p. 5.

dengan mengajukan surat izin pra-lapangan dari fakultas dan surat dinas pendidikan yang diajukan kepada sekolah untuk memperoleh izin guna mengetahui gambaran umum mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif serta kondisi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

2. Tahap Persiapan Penelitian

Peneliti menyusun dan menyiapkan proposal penelitian mengenai kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian mengajukan surat izin penelitian kepada pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, humas, guru pendamping khusus dan peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Pengumpulan data

Setelah mendapatkan izin dari pihak lembaga, peneliti membuat kesepakatan jadwal bersama informan untuk terjun kelapangan dan melakukan pengumpulan data sesuai metode dan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan.

4. Penganalisis dan pelapor penelitian

Setelah data terkumpul kemudian peneliti melakukan analisis untuk menjawab fokus penelitian. Kemudian, hasil analisis diinterpretasikan dan dikomparasikan dengan teori-teori yang digunakan, hasilnya kemudian disusun dalam laporan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMKN 2 Kota Malang di Jln. Veteran Malang No.17, Ketawanggede, Kec, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi atau letak sekolah

yang strategis. SMKN 2 Kota Malang juga merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang pertama kali menerapkan pendidikan inklusi di kota Malang. Selain itu, SMKN 2 Kota Malang juga memiliki lulusan (*out put*) yang memiliki prestasi serta mampu terjun di lingkungan pekerjaan. Kemudian SMKN 2 kota malang juga memiliki peminat yang cukup tinggi dari kalangan penyandang disabilitas di kota malang pada tingkat sekolah menengah kejuruan.

D. Data dan Sumber Penelitian

Data dan sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.⁴⁵ Adapun dalam penelitian ini sumber utamanya adalah data hasil wawancara, data hasil observasi dengan rincian sebagai berikut:

Data hasil wawancara dengan para informan meliputi :

- a) Kepala Sekolah SMKN 2 Kota malang
- b) WAKA Humas
- c) Koordinator Pendidikan Inklusif
- d) Guru Pendamping Khusus Perhotelan
- e) Guru Pendamping Khusus TKJ

Data hasil observasi dilapangan meliputi:

- a) Kerjasama antara lembaga sekolah dan industri.

⁴⁵ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian, Jusuf Aryani Learning*, 2017.

- b) Training anak berkebutuhan khusus sebagai persiapan masuk dunia kerja di kelas meliputi pelatihan vokasional, pengenalan karir dan magang.
- c) Faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh dari internal sekolah dan eksternal.

Data hasil dokumentasi dilapangan meliputi foto-foto, arsip atau dokumen-dokumen yang relevan terkait penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung melalui media perantara yang sudah tersedia .⁴⁶ Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah yang membahas pendidikan inklusif dan kesiapan kerja bagi penyandang disabilitas serta yang mendukung analisis terhadap implementasi kebijakan inklusif di lingkungan sekolah kejuruan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penting dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan serta menilai kualitas data, menganalisis, menafsirkan, hingga menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ialah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah, sumber data, serta hasil yang diharapkan.

Peneliti kualitatif pada awalnya memiliki rancangan penelitian sementara yang dapat berubah setelah peneliti terjun langsung ke lapangan.

⁴⁶ Panjaitan, *Metodologi Penelitian*.

Hal ini disebabkan karena pendekatan kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, serta tidak dapat dipisahkan antara variabel yang diteliti. Oleh karena itu, hingga peneliti benar-benar memahami konteks penelitian di lapangan, instrumen penelitian belum dibuat untuk penelitian kualitatif berupa kisi-kisi atau rancangan sementara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi :

1. Teknik *Interview* (Wawancara)

Interview menurut John W.Creswell teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, di mana pertanyaan diajukan secara lisan dan jawaban pun diperoleh secara lisan.⁴⁷ Dalam ini wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sudah disusun sebelumnya untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan, akan tetapi memberikan keluasaan kepada informan untuk menjawab secara bebas sesuai dengan pengalaman, pandangan, dan pengetahuannya. Kemudian peneliti mencatat atau merekam jawabannya dalam bentuk yang terstandarisasi.

2. Teknik Observasi

Pengumpulan data yang kedua dilakukan melalui teknik observasi non-partisipatif. Menurut Sugiyono observasi non-partisipatif berarti peneliti

⁴⁷ John W. Creswell & J David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 5th edn (SAGE Publications, 2018), doi:10.4324/9780429469237.

hanya berperan sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi kegiatan yang meliputi training atau persiapan magang, kegiatan praktik kejuruan, bimbingan karir di SMKN 2 Kota Malang.

Bidang kajian observasi dalam penelitian ini difokuskan pada kelas kejuruan perhotelan dan Teknik Komunikasi dan Jaringan (TKJ) bagi kelas inklusif khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang. Hasil dari observasi ini kemudian dicatat dan dianalisis untuk mendukung teman penelitian secara deskriptif.

3. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data yang ketiga dilakukan melalui teknik dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan sebagai salah satu cara penting untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Dokumen yang diperlukan mencakup foto - foto, data, serta arsip yang relevan dengan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan pendidikan inklusif untuk aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus, peneliti memerlukan berbagai dokumentasi program, seperti dokumen program kerja pendidikan inklusif, magang, training, dan keterlibatan mereka dalam dunia kerja.

Dengan penerapan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (ALFABETA, 2013).

Malang mendukung akses peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti akan melakukan analisis data. Adapun model analisis data yang akan peneliti gunakan yaitu analisis data model Miles Huberman dan Saldana. Dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis A Methods sourcebook*, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana mengemukakan bahwa model analisis data terdiri dari 3 tahapan utama yaitu :

1) Reduksi data (*data condentations*), 2.) Penyajian data (*data display*), 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁴⁹

Berdasarkan penjelasan diatas berikut uraiannya:

1. Reduksi data (*data condensation*)

Tahap pertama dari analisis data selanjutnya reduksi data, yaitu proses menyeleksi data yang relevan dan bermakna sesuai dengan fokus penelitian, yakni bentuk, implementasi, dan dampak dari kebijakan pendidikan inklusif dan aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang. Pada tahap ini, data yang sudah dihasilkan disederhanakan, dikategorikan, atau dikelompokkan dan disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar temuan. Hasil reduksi ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menyusun interpretasi dan menarik kesimpulan yang akurat terhadap fenomena yang diteliti.

⁴⁹ A. M. Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication, 1994, xvii.

2. Penyajian data (*data display*)

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses di mana peneliti menyusun dan menampilkan hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik agar informasi yang diperoleh supaya lebih mudah dipahami secara menyeluruh. Penyajian data ini membantu peneliti menggambarkan situasi nyata di SMKN 2 Kota Malang terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dan upaya sekolah dalam mendukung aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

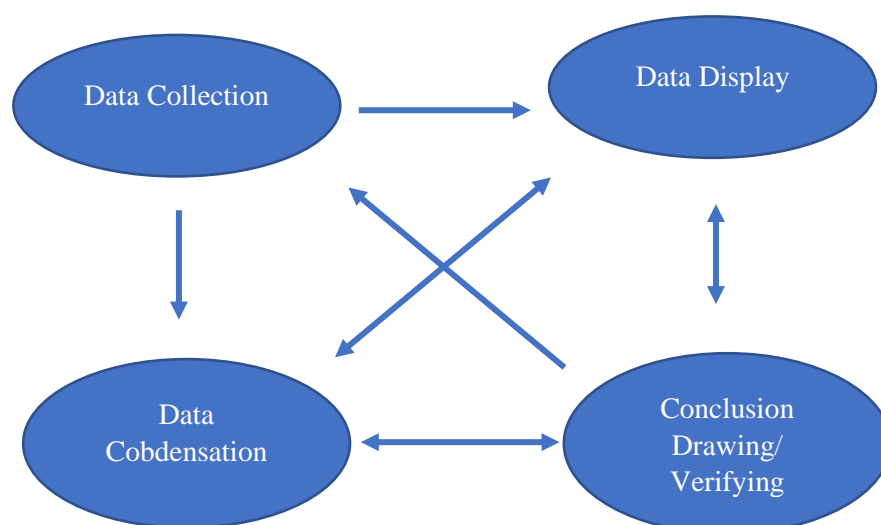
Melalui tahap ini, peneliti dapat melihat dan memahami konteks yang diliti dan terjadi di lapangan, serta menentukan langkah selanjutnya apakah langsung menuju proses penarikan kesimpulan atau melakukan analisis tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Dengan teknik penyajian data ini, peneliti dengan mudah dalam menyajikan data yang didapat dalam penelitian untuk menjawab fokus penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya untuk menjawab fokus penelitian. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara, dan dapat berubah apabila pada data tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh data dan bukti yang valid, dan relevan dengan temuan lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat hasil temuan, peneliti melakukan penggalian data lebih mendalam dengan beberapa informan utama, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru pendamping khusus (GPK), serta peserta didik berkebutuhan khusus jurusan perhotelan dan Teknik Komunikasi Jaringan (TKJ) di SMKN 2 Kota Malang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian dilapangan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya mengenai kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penjelasan tentang ketiga teknik analisis data sebelumnya, Miles, Huberman, dan Saldana menyusun ketiganya dalam bentuk pola siklus agar lebih mudah dipahami. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai model interaktif. Melalui model ini, mereka menyajikan proses analisis data kualitatif yang saling terhubung, sehingga mempermudah peneliti dalam memahami dan menerapkan tahapan-tahapan analisis data. Berikut adalah gambaran siklus analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana:



Gambar 4.1 *Component of Data Analysis : Interactive Model*

H. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) tingkat kebenaran data diperlukan teknik pemeriksaan. Peneliti menggunakan Triangulasi untuk peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Mudja Raharjo triangulasi merupakan upaya untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti melalui beragam sudut pandang.⁵⁰

Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan cara mengecek keabsahan data yang diperoleh melalui perbandingan hasil wawancara antar-informan. Apabila ditemukan adanya perbedaan informasi, peneliti akan terus melakukan penggalian data dari berbagai sumber hingga memperoleh jawaban yang konsisten atau memiliki kesamaan makna di antara informan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data dengan cara memeriksa kembali kesesuaian antara prosedur dan proses pengumpulan data dengan metode yang digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan data secara

⁵⁰ Mudjia Rahardjo, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2010, p. 191.

berulang melalui berbagai teknik pengumpulan data, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.⁵¹

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui triangulasi, yaitu setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dan merapkannya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, peneliti kembali ke lokasi penelitian di SMKN 2 Kota Malang untuk bertemu dengan pihak terkait guna melakukan pengecekan ulang sebagai langkah koreksi dan verifikasi, sehingga dapat dipastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan informasi yang diberikan serta mencerminkan kondisi sebenarnya.

I. Prosedur Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan beberapa tahap, diantaranya:

1. Pra- Penelitian

Tahapan sebelum penelitian atau terjun dilapangan adalah analisis bersifat sementara dan mungkin akan berkembang. Analisis dilakukan terhadap data akibat studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dipergunakan buat memilih fokus dari penelitian.

2. Pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini pelaksanaan dilakukan ketika pengumpulan data serta sesudah pengumpulan data terselesaikan buat jangka waktu eksklusif. Ketika melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap data wawancara, namun bila jawaban informan dirasa kurang memuaskan maka peneliti bisa melanjutkan pertanyaan hingga langkah tertentu dirasa tepat.

⁵¹ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*, Borneo Novelty Publishing, 2024, 10.70310/Q, doi:10.70310/q81zdh33.

3. Pengelolaan Data

Pada tahap ini, setelah melaksanakan terjun dilapangan peneliti melanjutkan mengelola atau mengolah data hasil lapangan sesuai teori dan memilah data yang relevan serta valid untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

4. Menuliskan data hasil penelitian

Pada tahap ini sebagai tahap terakhir peneliti menuliskan hasil yang diperoleh dari informan berupa laporan. Laporan penelitian ini disusun dalam format yang telah ditetapkan, mudah dipahami, serta konsisten menggunakan prinsip – prinsip ilmiah.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL

A. Gambara Umum Penelitian

1. Profil Sekolah

Nama	:	SMKN 2 Kota Malang
Status Lembaga	:	Negeri
Jumlah Peserta Didik Keseluruhan	:	1.726
Jumlah Peserta Didik Inklusif	:	27
Akreditasi Sekolah	:	A
Afiliasi	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Alamat	:	Jl. Veteran No.17, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
Kode Pos	:	65145
No. Telp	:	+62 341 551 504
Website	:	https://www.smkn2malang.sch.id/

2. Visi Sekolah

“Mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter, berbudaya dan peduli lingkungan”⁵²

3. Misi Sekolah

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

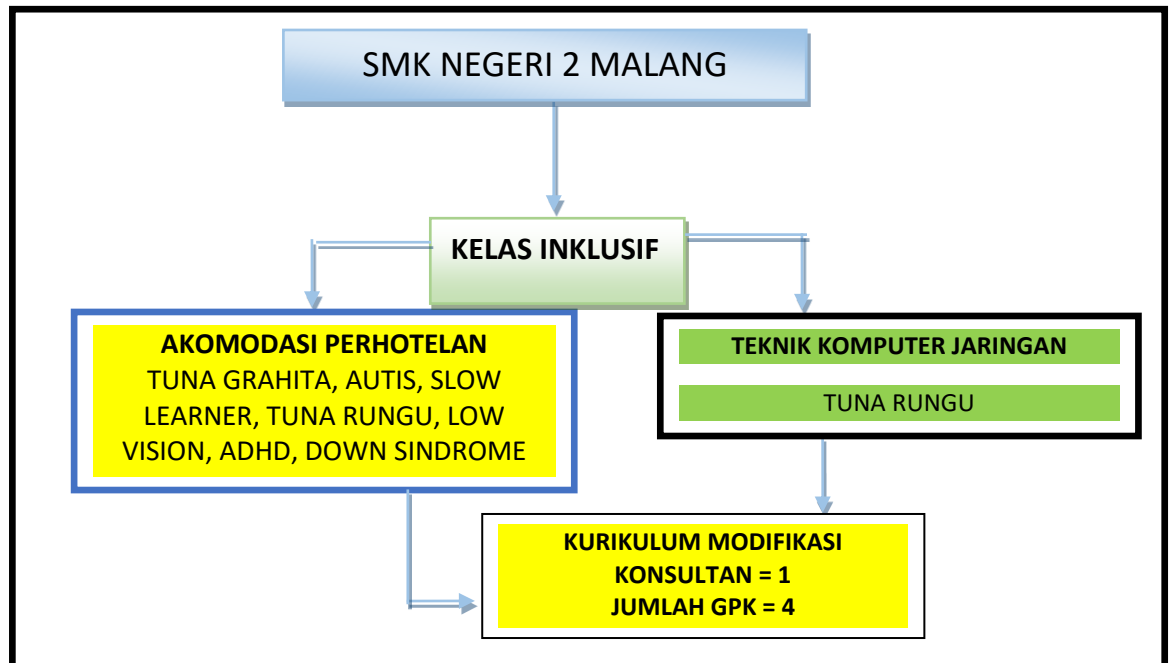
⁵² Website : <https://www.smkn2malang.sch.id/>

- b. Menumbuhkan kembangkan semangat keunggulan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan nilai- nilai karakter bangsa.

4. Tujuan Sekolah

- a. Terwujudnya Pelayanan Prima melalui sistem Manajemen Mutu.
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, produktif, dan mandiri.
- c. Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara sekolah, masyarakat dan dunia usaha / industri.
- d. Terwujudnya lulusan yang peduli dan termotivasi dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- e. Terciptanya budaya dan komitmen tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

5. Struktur Layanan Program Pendidikan Inklusi SMKN 2 Kota Malang



Gambar 4.1 Struktur Inklusif

6. Sejarah Singkat Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang sudah di mulai sejak tahun 2010 berdasarkan intruksi Diknas Kota Malang. Namun Surat Keputusannya baru datang pada tahun 2011 yaitu; nomer: 800/1850/35.73.307/2011/SK, selanjutnya Surat Keputusan tersebut semakin menguatkan keberadaan SMKN 2 Malang menjadi satu-satunya sekolah menengah atas yang vokasi atau kejuruan untuk menjadi sekolah inklusi, sehingga mulai saat itu juga SMKN 2 Malang menerima siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Kebijakan tersebut yaitu menjadi sekolah yang melaksanakan inklusi merupakan hal baru bagi keluarga besar SMKN 2 Malang oleh karena itu segera ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi secara terus menerus hal itu karena adaptasi dengan situasi dan kondisi baru merupakan tantangan yang tidak mudah bagi semua pihak. Disamping sarana dan prasana yang diperlukan untuk siswa ABK, sikap

dan mental siswa serta guru juga dipersiapkan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari keluarga besar SMKN 2 Malang.

Berdasarkan observasi pada GPK (Guru Pendamping Khusus) dan konselor di SMK Negeri 2 Malang, bahwa mendidikan siswa inklusif dibutuhkan strategi serta ketelatenan khusus. Siswa yang berada satu kelas dengan anak berkebutuhan khusus harus diberi sosialisasi terlebih dahulu. Begitu pula guru yang mengajar di kelas tersebut, hal itu dimaksudkan untuk terciptanya kegiatan pembelajaran yang kondusif. Seringkali peristiwa yang ada di kelas inklusi kadang-kadang menarik perhatian dan memerlukan penanganan khusus. Ada hal hal yang harus kita tangani dengan serius dan sungguh sungguh antara lain, seperti siswa-siswa reguler yang meremehkan, menjahili, mengancam, atau membuli (*bullying*), kadang mengolok-olok dan menggoda teman mereka yang berkebutuhan khusus. Ada juga yang beranggapan bahwa siswa berkebutuhan khusus itu aneh dan berbeda , yang mana semua itu menuntut adanya sikap empati dari lingkungannya. Peristiwa-peristiwa tersebut sedikit banyak membawa suasana pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku dan kebiasaan siswa yang sedang dalam proses pencarian identitas diri dan dapat membentuk sikap empati siswa pada umumnya.⁵³

7. Latar Belakang Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang

Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang ,Lokasinya ada di jalan Veteran 17 Malang, dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang nomer : 800/1850/35.73.307/2011. Pada saat itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah SMK Negeri 2 Malang yaitu ibu Drs. Faizah,M.Pd, sedangkan manajernya adalah ibu Eviatun Khaeriah,S.Psi, M.Si. Siswa inklusif diarahkan untuk memasuki program keahlian Teknik komputer Jaringan dan Akomodasi perhotelan. Sedangkan guru yang mengelola dan mengajar siswa inklusif, 1 koordinator inklusif, guru reguler ada 15 orang, guru pendamping khusus / GPK 4 orang, serta konselor 2 orang.

Latar belakang SMK Negeri 2 Malang ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan inklusif antara lain; 1) Pelayanan pendidikan inklusif bagi anak

⁵³ Hasil ringkasan data berupa dokumen profil, 26 November 2025

berkebutuhan khusus belum mendapat perhatian yang sesuai. 2) Semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali bagi warga negara yang berkebutuhan khusus. 3) Jumlah anak berkebutuhan khusus lulusan Sekolah Menengah Pertama atau SMP semakin bertambah di kota Malang. 4) Belum ada pendidikan inklusif yang menampung lulusan SMP inklusif yang bersifat kejuruan atau pada SMK di kota Malang.⁵⁴

8. Karakteristik Siswa dan Penanganannya

Tabel 4.1 Diagnosa dan Penanganan

Diagnosa	Penanganan
Autis, gangguan perkembangan saraf kompleks yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku dan minat penderitanya.	Akademik: menggunakan pendekatan pembelajaran individual. Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, hipnoterapi.
Tuna Grahita, (disabilitas intelektual) adalah kondisi keterbatasan fungsi intelektual dan kognitif di bawah rata-rata (IQ di bawah 70-75) yang muncul pada masa perkembangan	Akademik: pembelajaran individual dan tutor sebaya Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, analisis perubahan tingkah laku.
Slow Learner, lamban belajar anak dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata (IQ sekitar 70-90), namun bukan disabilitas intelektual	Akademik: pembelajaran klasikal dan tutor sebaya Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, analisis perubahan tingkah laku.

⁵⁴ Hasil ringkasan data berupa dokumen profil, 26 November 2025

Low Vision, gangguan penglihatan permanen (tajam penglihatan kurang dari 6/18 hingga persepsi cahaya yang tidak dapat dikoreksi penuh dengan kacamata biasa, lensa kontak, obat-obatan, atau operasi.	Akademik: pembelajaran klasikal dan tutor sebaya Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, analisis perubahan tingkah laku.
Down Sindrom, kelainan genetic akibat kelebihan kromosom 21 (trisomy 21), di mana penderita memiliki 47 kromosom, bukan 46	Akademik: pembelajaran individual dan tutor sebaya Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, analisis perubahan tingkah laku.
ADHD, gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan gejala inatensi (kurang fokus), hiperaktif, dan impulsif.	Akademik: pembelajaran individual dan tutor sebaya Perilaku dan emosi: konseling, terapi perilaku, analisis perubahan tingkah laku.
Tuna Rungu Wicara, disabilitas gabungan gangguan pendengaran dan ketidakmampuan berbicara.	Akademik: pembelajaran klasikal dengan pendampingan Perilaku dan sosialisasi: konseling, konseling sebaya, bimbingan.

B. Hasil Penelitian

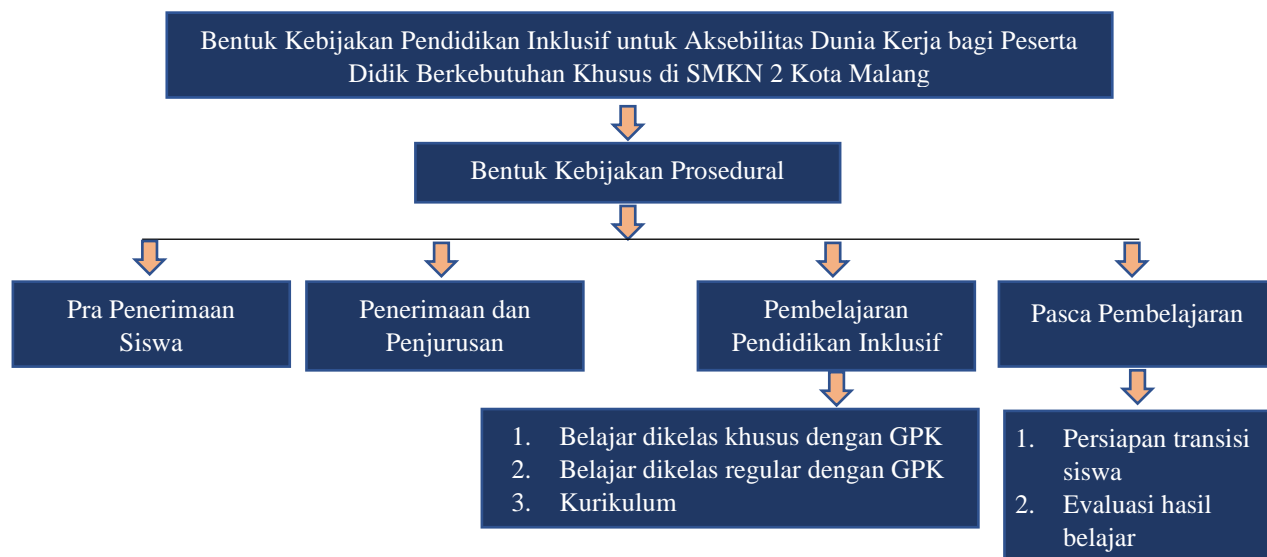
Pada bagian ini memaparkan analisis data penelitian yang berfokus pada hasil temuan lapangan melalui pemeriksaan dokumen serta pelaksanaan wawancara mendalam dengan berbagai informan. Informan tersebut meliputi kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), koordinator pendidikan inklusif, guru pendamping khusus, serta peserta didik berkebutuhan

khusus. Seluruh data yang diperoleh digunakan untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh kepala sekolah SMKN 2 Kota Malang, khususnya dalam mendukung aksebilitas peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja. Analisis data pada bab ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai bentuk kebijakan, implementasi dan dampak kebijakan pendidikan inklusif yang telah dijalankan oleh sekolah. Bagian ini dimulai dengan membahas mengenai bentuk kebijakan pendidikan inklusif yang dirancang dan ditetapkan oleh kepala sekolah SMKN 2 Kota Malang. Bagian kedua, yaitu berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam mendukung aksebilitas peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja. Selanjutnya, bagian ketiga membahas mengenai dampak kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di SMKN 2 Kota Malang, Dampak yang dianalisis mencakup dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian, pemaparan hasil pada bagian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan pendidikan inklusif dalam mendukung aksebilitas peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja.

1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Aksebilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang

Kebijakan yang dirancang oleh kepala sekolah tidak berdiri secara mandiri, melainkan mengacu pada pedoman dan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi peserta didik di SMKN 2 Kota Malang. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara, bentuk kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang

menitikberatkan pada kebijakan prosedural yang mengatur mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Berikut alur dari kebijakan pendidikan inklusif.



Gambar 4.2 Alur Kebijakan

a. Bentuk Kebijakan Prosedural

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, bentuk kebijakan kepala sekolah SMKN 2 Kota Malang diwujudkan melalui serangkaian mekanisme operasional dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti fase pra penerimaan, fase penerimaan dan pembelajaran serta pasca pembelajaran. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pedoman teknik khusus sebagai dasar supaya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing – masing peserta didik.

1.) Pra penerimaan Siswa

Tahap pra penerimaan dalam kebijakan prosedural pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua serta proses asesmen

awal terhadap calon peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak Hari Mulyono selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang menyatakan:

“Sebelum PPDB, calon siswa dikumpulkan terlebih dahulu untuk dilakukan observasi dan wawancara terpisah antara siswa dan orang tua. Selain itu juga dilihat hasil pemeriksaan dokter dan psikotes. Dari hasil assessment tersebut baru ditentukan apakah siswa bisa diterima dan diarahkan ke jurusan yang sesuai dengan kemampuannya.”⁵⁵

Sekolah menetapkan kuota penerimaan siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan melakukan seleksi melalui asesmen untuk mengetahui kondisi, kemampuan, serta kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai. Proses asesmen dilakukan sebelum penerimaan peserta didik baru untuk memastikan bahwa sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang optimal serta menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Selain itu, asesmen juga melibatkan komunikasi dengan orang tua, hasil pemeriksaan dokter, serta psikotes sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penerimaan siswa ABK. Peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi dan tidak dapat diterima oleh sekolah akan direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lain yang memiliki fasilitas lebih memadai. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus dapat terpenuhi secara optimal, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

dikhawatirkan belum mampu mendukung perkembangan peserta didik tersebut secara maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya menerima siswa berdasarkan pendaftaran, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan layanan dan kebutuhan individual peserta didik.

2.) **Penerimaan dan Penjurusan**

Penerimaan dan pemilihan jurusan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) merupakan tahapan kedua yang sangat menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, khususnya dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada sekolah vokasional, penempatan jurusan tidak hanya mempertimbangkan minat siswa, tetapi juga kemampuan akademik, keterampilan fungsional, kesiapan emosional, serta prospek aksesibilitas dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di SMKN 2 Kota Malang, proses penerimaan dan penjurusan dilakukan secara sistematis melalui asesment awal, observasi, wawancara dengan orang tua, serta koordinasi antar guru dan Koordinator Pendidikan Inklusif. Kepala sekolah mengatakan:

“Kami mengambil kebijakan bahwa SMKN 2 siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya di jurusan pekerjaan sosial, tetapi program keahlian lain silakan saja, asal memenuhi standar melalui assessment dan juknis khusus. Sebelum PPDB dibuka kami sosialisasikan. Jika kuota 15 dan yang mendaftar 30, maka dilakukan assessment terlebih dahulu. Kalau tidak mampu kami tangani, tidak kami paksakan untuk diterima.”⁵⁶

⁵⁶ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

Guru Pendamping Khusus mengemukakan:

“Sebelum PPDB anak-anak yang ingin mendaftar dikumpulkan dulu, dilihat, observasi dan diwawancarai terpisah antara orang tua dan murid. Ada syarat hasil pemeriksaan dokter dan psikotes.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara, proses penerimaan ABK di SMKN 2 Kota Malang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui tahapan assessment yang meliputi observasi kemampuan siswa, wawancara orang tua, serta pertimbangan hasil psikotes. Sekolah juga menetapkan kuota tertentu setiap tahunnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya membuka akses secara administratif, tetapi mempertimbangkan kesiapan layanan agar ABK dapat memperoleh pendidikan yang optimal. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik yang diterima benar-benar dapat dilayani sesuai dengan kapasitas sekolah. Adapun jurusan untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah jurusan perhotelan dan teknik komunikasi dan jaringan.

Koordinator Pendidikan Inklusif mengutarakan:

“Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu siswa dengan hambatan kecerdasan dan tanpa hambatan kecerdasan. Untuk yang tanpa hambatan kecerdasan mengikuti kurikulum yang sama dengan siswa reguler tetapi dengan penyesuaian, misalnya siswa tuna rungu tidak mengikuti listening dalam pembelajaran bahasa inggris. Sedangkan siswa dengan hambatan kecerdasan diberikan pembelajaran keterampilan hidup seperti jual beli, pengenalan mata uang, dan jam pembelajaran yang berbeda.”⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

⁵⁸ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa inklusif di SMK Negeri 2 Malang terdiri dari berbagai jenis kebutuhan khusus, sehingga penentuan program keahlian dilakukan berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing siswa. Siswa dengan autisme dan tunagrahita umumnya memiliki hambatan kecerdasan dalam pembelajaran, berkomunikasi serta berinteraksi sosial, sehingga ditempatkan pada program keahlian perhotelan. Pada program ini, siswa lebih banyak melakukan aktivitas kerja yang tidak menuntut interaksi intensif dengan orang lain, seperti kegiatan *housekeeping*, penataan tempat tidur, dan *laundry*, yang sekaligus dapat melatih serta meningkatkan kemampuan motorik mereka. Sedangkan peserta didik inklusif dengan hambatan pendengaran atau tuna rungu atau hambatan tanpa kecerdasan ditempatkan pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Penempatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa tuna rungu umumnya memiliki kemampuan kognitif yang relatif baik dibandingkan beberapa jenis ketunaan lainnya. Selain itu, mereka cenderung mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar bersama siswa reguler, meskipun dalam proses komunikasi mereka lebih banyak menggunakan bahasa isyarat. Guru Pendamping Khusus mengatakan:

*“Pemilihan jurusan dibicarakan dengan orang tua. Ada anak yang minat jurusan tertentu, tetapi jika ada kendala intelektual lebih diarahkan ke perhotelan sesuai kemampuan. Untuk anak-anak dimodifikasi sesuai kemampuan.”*⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

Jurusan Perhotelan menjadi salah satu jurusan yang dominan dipilih bagi peserta didik ABK. Hal ini dikarenakan karakteristik pembelajarannya yang berbasis praktik langsung, seperti *housekeeping* and *laundry* yang lebih mudah dipahami melalui pembiasaan dan latihan berulang. Pemilihan jurusan ini dilakukan melalui diskusi antara sekolah dan orang tua dengan mempertimbangkan kemampuan intelektual, tingkat kemandirian, serta potensi keterampilan yang dapat dikembangkan. Selain itu, pembelajaran di jurusan Perhotelan dimodifikasi sesuai dengan kapasitas siswa, baik dari segi materi maupun metode praktik.

Guru Pendamping Khusus:

*“Jurusan Teknik Komunikasi dan Jaringan (TKJ) diperuntukkan bagi peserta didik ABK yang memiliki kemampuan kognitif lebih stabil.”*⁶⁰

Jurusan Teknik Komunikasi dan Jaringan (TKJ) diperuntukkan bagi peserta didik ABK yang memiliki kemampuan kognitif lebih stabil dan mampu mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Penyesuaian dilakukan pada mata pelajaran tertentu, terutama Bahasa Inggris yang dianggap cukup sulit bagi siswa dengan hambatan tertentu seperti tuna rungu. Modifikasi materi dilakukan dengan mengurangi komponen listening dan menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih visual. Pemilihan TKJ menunjukkan bahwa sekolah tidak membatasi ABK hanya pada jurusan berbasis keterampilan manual, tetapi juga membuka

⁶⁰ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

akses pada jurusan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan individu.

Tabel 4.2 Data Peserta Didik Inklusif Tahun 2020-2021

NAMA	DIAGNOSA	KELAS	JURUSAN
KNL	Slow Learner	X	AP
JDC	Add	X	AP
LAZ	Slow Learner	X	AP
RW	Tuna Grahita	X	AP
NIP	Tuna Grahita	X	AP
MDMRN	Tuna Grahita	X	AP
ATP	Tuna Grahita	X	AP
EAP	Tuna Grahita	X	AP
NHE	Tuna Grahita	X	AP
DTP	Autis	X	AP
MAH	Lambat Belajar	X	TKJ
DSP	Tuna Grahita Ringan	XI	AP
RAMYH	Tuna Grahita Sedang	XI	AP
AIZ	Autis	XI	AP
ANW	Adhd	XI	AP
HRDP	Tuna Grahita Sedang	XI	AP
FSZ	Tuna Grahita Ringan	XI	AP
MNABH	Tuna Rungu	XII	TKJ
EC	Tuna Rungu Wicara	XII	TKJ
AMR	Tuna Rungu	XII	TKJ
AKT	Tuna Grahita Ringan	XII	AP
AJDW	Adhd	XII	AP
FP	Tuna Grahita Ringan	XII	AP
RSG	Tuna Grahita Ringan	XII	AP
ASQ	Tuna Grahita Ringan	XII	AP
MIJ	Tuna Grahita Sedang	XII	AP
EFDR	Tuna Grahita, Down Syndrome	XII	AP

3.) Pembelajaran Pendidikan Inklusif

Berdasarkan analisis dokumen dan hasil wawancara pada tahap pembelajaran, kebijakan prosedural diwujudkan melalui penyediaan layanan pendidikan yang menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa ABK. Sekolah menyediakan guru pendamping khusus (GPK) yang bertugas mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, serta melakukan sharing pengetahuan kepada guru reguler agar mampu memberikan layanan pembelajaran inklusif. Kepala sekolah menyatakan:

*“Sekolah tetap menyediakan guru pendamping khusus. Selain itu, guru-guru lain juga diberikan transfer ilmu agar mampu menangani siswa ABK serta sosialisasi. Pembelajaran dilakukan secara fleksibel, ada yang mengikuti kelas reguler dan ada juga yang belajar di kelas khusus. Semua disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa.”*⁶¹

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui sistem kelas reguler dan kelas khusus sesuai dengan kemampuan siswa.

a) Belajar dikelas khusus dengan guru pendamping khusus

SMKN 2 Kota Malang menerapkan sistem pembelajaran kelas khusus dengan pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK). Model ini bertujuan untuk menyesuaikan layanan pendidikan dengan kemampuan dan kebutuhan individual siswa agar proses belajar tetap optimal. Kepala Sekolah mengemukakan:

“Jadi proses pembelajaran ada yang kelas reguler, ada yang di kelas khusus. Jadi mungkin ada yang tidak dimungkinkan untuk anak-anak itu di kelas reguler dengan pertimbangan

⁶¹ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang , 21 Januari 2026

keselamatan, tentang kemampuan dan sebagainya. Maka dia akan ditarik di kelas-kelas khusus.”⁶²

Koordinator Pendidikan Inklusif:

“Kalau untuk anak dengan hambatan kecerdasan sekolah memberi dengan jam berbeda, ada kalanya dia berada di kelas reguler dan ada juga kalanya dia berada di kelas khusus, untuk mata pelajaran yang mereka tidak bisa sama sekali. Contoh MTK dan Bahasa Inggris yang ketika mencapai grammar mereka tidak bisa, oleh karena itu sekolah memberi materi yang lebih sederhana dan berguna dengan keterampilan hidup mereka.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran di kelas khusus diterapkan bagi siswa ABK yang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran reguler secara penuh. Penempatan di kelas khusus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, kesiapan emosional, dan faktor keselamatan. Sistem ini bersifat fleksibel, karena siswa dapat berpindah antara kelas reguler dan kelas khusus sesuai kebutuhan mata pelajaran tertentu. Misalnya pada Matematika dan Bahasa Inggris yang bersifat abstrak, materi dimodifikasi menjadi lebih sederhana dan berorientasi pada keterampilan hidup.

Selain itu, sekolah menyediakan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berperan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sekaligus memberikan pendampingan selama kegiatan praktik keterampilan. Melalui sistem ini, peserta didik inklusif tetap dapat mengikuti pembelajaran bersama siswa

⁶² Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang , 21 Januari 2026

⁶³ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2026

reguler, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel sesuai kemampuan masing-masing.

Guru Pendamping Khusus mengatakan:

“GPK lebih ke perkembangan individual jika butuh. Tidak semua guru bisa memahami atau memberikan pola mengajar yang sesuai, memang setiap murid sama kebutuhannya tapi beda cara menerima pembelajarannya dan emosinya.”⁶⁴

Guru Pendamping Khusus (GPK) memiliki peran sentral dalam pembelajaran ini. GPK tidak hanya mendampingi secara akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan individual siswa, termasuk aspek emosional dan sosial. Berdasarkan hasil observasi kelas khusus juga dimanfaatkan untuk melatih kemandirian melalui pembiasaan dan praktik keterampilan sehari-hari.⁶⁵ Dengan demikian, pembelajaran di kelas khusus dengan GPK merupakan strategi adaptif dalam pendidikan inklusif yang bertujuan memberikan layanan sesuai kebutuhan individual tanpa menghilangkan kesempatan siswa untuk tetap berinteraksi di kelas reguler.

Selanjutnya terkait pelaksanaan ujian akhir kepala sekolah mengatakan:

“Ujian akhir bagi peserta didik inklusif dilaksanakan berdasarkan kebijakan sekolah dengan materi yang disusun oleh GPK bersama guru reguler sesuai kemampuan siswa. Peserta didik inklusif tidak mengikuti Ujian Nasional, dan kelulusannya berstatus Tamat Belajar dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.”⁶⁶

⁶⁴ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

⁶⁵ Hasil Observasi di Kelas Khusus, 26 November 2025

⁶⁶ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

Hasil dari wawancara diatas ujian akhir bagi siswa inklusif dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal sekolah. Hal ini dilakukan karena kondisi dan keterbatasan siswa sehingga mereka tidak mengikuti Ujian Nasional seperti siswa lainnya. Penyusunan soal ujian dilakukan oleh Guru Pendamping Khusus bersama guru mata pelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa. Status kelulusan siswa inklusif dinyatakan sebagai Tamat Belajar, sedangkan dokumen Surat Keterangan Tamat Belajar tetap diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.



Gambar 4.3 Belajar di Kelas Khusus⁶⁷

Kebijakan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dan adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan individual peserta didik.

b.) Belajar di kelas reguler dengan guru pendamping khusus

Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran vokasional, siswa ABK tetap mengikuti kegiatan praktik bersama siswa reguler dengan pendampingan khusus. Sekolah juga memberikan pelatihan keterampilan kerja serta persiapan magang melalui

⁶⁷ Hasil Dokumentasi di Kelas Khusus Jurusan Perhotelan, 26 November 2025

pembekalan *soft skill* dan *hard skill* sebelum siswa ditempatkan pada dunia industri atau unit produksi sekolah pada semester 1 kelas 12. Koordinator Pendidikan Inklusif mengatakan:

*“Siswa ABK tetap mengikuti praktik bersama siswa reguler, namun jika ada yang belum mampu maka akan didampingi secara khusus. Sebelum praktik, biasanya siswa dilatih terlebih dahulu oleh guru pendamping agar mereka memahami prosedur kerja.”*⁶⁸

Pelaksanaan praktik kerja industri bagi sebagian peserta didik inklusif dilakukan di lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun orang tua. Selain itu, pelaksanaan praktik di lingkungan sekolah memudahkan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas peserta didik. Seperti gambar dibawah ini.



Gambar 4.4 Pembelajaran dikelas reguler⁶⁹

Berdasarkan observasi dikelas terdapat guru mata pelajaran dan Guru Pendamping Khusus. Kondisi tersebut juga memungkinkan pemberian penanganan secara cepat apabila

⁶⁸ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

⁶⁹ Hasil Dokumentasi Pembelajaran Inklusif dikelas Regular, 26 November 2025

terjadi situasi yang tidak terduga, seperti gangguan kesehatan maupun ketidakstabilan kondisi psikologis peserta didik.⁷⁰

Guru Pendamping Khusus mengemukakan:

“Kelas digabung dengan siswa regular. Mengenali siswa dengan system, yaitu mengenali siswa regular bahwa ada teman- teman ABK supaya mereka bisa membaur, tidak membedakan dan bisa berinteraksi sewajarnya”⁷¹

Selain aspek akademik, pembelajaran di kelas reguler juga berperan dalam membangun interaksi sosial. Guru secara aktif mengenalkan keberadaan siswa ABK kepada siswa reguler agar tercipta suasana saling menerima dan tidak terjadi diskriminasi. Dengan demikian, kelas reguler tidak hanya menjadi ruang belajar akademik, tetapi juga ruang pembelajaran sosial dan pembentukan karakter inklusif.

Model pembelajaran ini mencerminkan prinsip pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi semua siswa untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama, dengan tetap memberikan penyesuaian sesuai kebutuhan individu.

c.) Kurikulum

Sekolah SMKN 2 Kota Malang juga melakukan modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, serta materi ajar agar lebih sesuai dengan kondisi peserta didik, seperti pengurangan materi yang sulit dan penekanan pada keterampilan hidup dan kemandirian.

⁷⁰ Hasil Observasi di Kelas Reguler, 26 November 2025

⁷¹ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui penyesuaian kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik inklusif. Peserta didik yang tidak memiliki hambatan kecerdasan mengikuti kurikulum reguler dengan beberapa modifikasi, sedangkan peserta didik dengan hambatan kecerdasan lebih diarahkan pada penguasaan keterampilan kerja sederhana dan keterampilan hidup.

Koordinator Pendidikan Inklusif Mengatakan :

“Pembelajaran bagi peserta didik inklusif disesuaikan dengan kondisi siswa. Ada yang mengikuti pembelajaran reguler dengan penyesuaian materi, dan ada juga yang lebih diarahkan pada pembelajaran keterampilan kerja dan kemandirian. Guru pendamping khusus membantu siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.”⁷²

Terkait kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran inklusif menggunakan kurikulum adaptif atau kurikulum modifikasi yang disusun melalui kerja sama antara Guru Pendamping Khusus (GPK) dan guru reguler. Kurikulum ini dirancang untuk menyesuaikan kemampuan, kebutuhan, serta karakteristik peserta didik inklusif agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Penerapan kurikulum modifikasi terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, duplikasi kurikulum, yaitu peserta didik inklusif menggunakan kurikulum yang sama dengan siswa reguler tanpa perubahan tingkat kesulitan. Model ini umumnya diterapkan pada peserta didik

⁷² Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

yang tidak mengalami hambatan intelektual, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras. Kedua, modifikasi kurikulum, yaitu penyesuaian kurikulum reguler sesuai kemampuan peserta didik, baik dengan menurunkan tingkat kesulitan materi bagi tunagrahita maupun meningkatkan materi bagi peserta didik berbakat. Ketiga, substitusi kurikulum, yaitu penggantian sebagian materi pembelajaran dengan materi lain yang setara dan lebih sesuai dengan kondisi peserta didik. Keempat, komisi kurikulum, yaitu penghapusan beberapa materi pembelajaran yang dinilai tidak dapat diikuti oleh peserta didik inklusif karena keterbatasan tertentu.

4.) Pasca Pembelajaran

Tahap pasca pembelajaran dalam kebijakan prosedural pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang berfokus pada persiapan transisi siswa menuju dunia kerja, pendidikan lanjutan, atau kemandirian berwirausaha dan evaluasi hasil pembelajaran.

a.) Persiapan Transisi Siswa

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), tahap transisi ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan keberlanjutan akses terhadap dunia kerja, pendidikan tinggi, maupun kemandirian melalui wirausaha. Oleh karena itu, sekolah perlu menyiapkan mekanisme pendampingan dan pemantauan lulusan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Kepala sekolah mengutarakan:

“Sekolah menyediakan pusat karir dan grup alumni untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan. Selain itu, sekolah juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia industri yang dapat menerima siswa berkebutuhan khusus. Sekolah juga memantau lulusan untuk mengetahui apakah mereka bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha.”⁷³

Sekolah melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa setelah lulus melalui kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, serta penyediaan akses informasi lowongan pekerjaan melalui pusat karir sekolah. Humas mengatakan:

“Selama tiga tahun di sekolah, kami mengamati potensi siswa. Jika siswa tidak memungkinkan melanjutkan kuliah, maka sekolah membantu mencarikan pekerjaan atau mengarahkan ke wirausaha sesuai keterampilan yang dimiliki. Contohnya ada siswa yang dilatih laundry dan setelah lulus membuka usaha laundry sendiri.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, setelah lulus peserta didik atau alumni akan tergabung dalam grup PKK (Pusat Kerja Khusus) atau Career Center yang berfungsi sebagai sarana memperoleh akses informasi terkait lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Melalui wadah tersebut, sekolah juga dapat memantau keberlanjutan lulusan, baik yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bekerja di dunia industri, maupun yang memilih untuk berwirausaha. Hal ini sekaligus menjadi salah satu indikator bagi SMKN 2 Kota Malang dalam mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan yang telah dilaksanakan.

⁷³ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁷⁴ Hasil Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang, 03 Desember 2025

b.) Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi hasil pembelajaran dalam pendidikan inklusif merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Dalam pelaksanaannya, evaluasi mencakup waktu pelaksanaan, indikator yang digunakan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penilaian.

Kepala Sekolah mengemukakan:

“Evaluasi dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama Guru Pendamping Khusus. Untuk keputusan akhir seperti kenaikan kelas atau kelulusan, dilakukan melalui rapat dewan guru agar lebih objektif. Sekolah juga melakukan evaluasi program setiap akhir semester untuk melihat apakah layanan inklusi sudah berjalan efektif atau masih perlu perbaikan. Capaian keberhasilan dan tidak dilihat dari alumni juga.”⁷⁵

Koordinator Pendidikan Inklusif:

“Evaluasi dilakukan secara bertahap. Ada evaluasi harian melalui pengamatan guru di kelas, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Untuk anak inklusi, biasanya kami juga melakukan evaluasi perkembangan setiap 6 bulan untuk melihat peningkatan kemampuannya. Indikator evaluasi tidak hanya akademik, tetapi juga melihat perkembangan sikap, kemandirian, dan keterampilan praktik yang sesuai dengan jurusannya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara, evaluasi hasil pembelajaran di SMKN 2 Kota Malang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis. Dari segi waktu, evaluasi dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu evaluasi harian melalui observasi di kelas, evaluasi

⁷⁵ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁷⁶ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

tengah semester, evaluasi akhir semester, serta evaluasi perkembangan berkala khusus bagi peserta didik inklusi.

Indikator evaluasi tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga mencakup perkembangan sikap, keterampilan praktik, serta kemandirian siswa. Bagi peserta didik dengan hambatan kecerdasan, indikator disesuaikan dengan kemampuan awal siswa, sehingga yang menjadi tolok ukur utama adalah peningkatan (*progress*) yang dicapai.

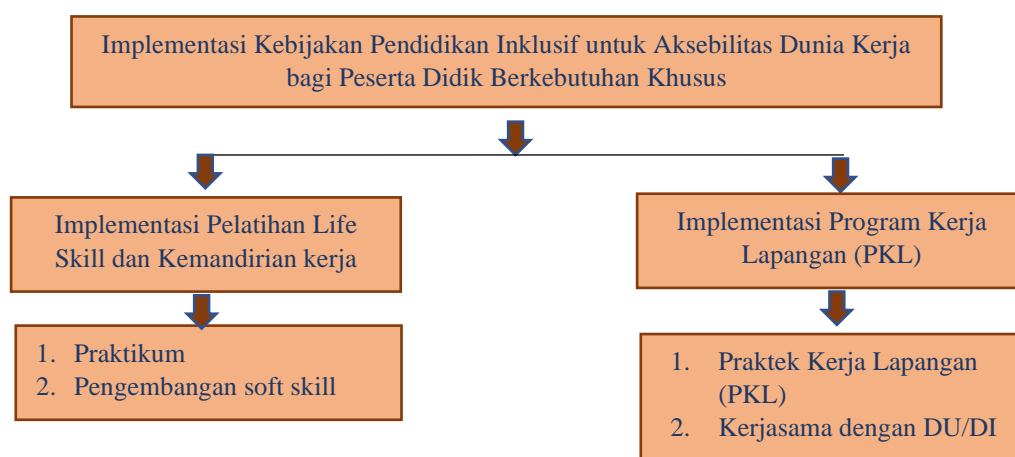
Dari sisi pelaksana, evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran dan Guru Pendamping Khusus (GPK). GPK berperan dalam memberikan pertimbangan terkait kondisi individual siswa, sementara guru mata pelajaran menilai capaian kompetensi sesuai bidang keahlian. Untuk keputusan strategis seperti kenaikan kelas dan kelulusan, evaluasi dibahas melalui rapat dewan guru agar menghasilkan keputusan yang objektif dan komprehensif.

Dengan demikian, sistem evaluasi yang diterapkan bersifat adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada perkembangan individual siswa. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi dalam pendidikan inklusif tidak semata-mata mengukur hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang

dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja dan kemandirian peserta didik. Program tersebut dilaksanakan melalui pelatihan life skill dan kemandirian dan implementasi program kerja lapangan (PKL) dan kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri sebagai upaya mempersiapkan peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi dunia kerja. Untuk memperjelas proses implementasi tersebut, berikut disajikan bagan alur pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.



Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Implementasi Pelatihan Life Skill dan Kemandirian Kerja

1.) Praktikum

Dalam pendidikan vokasional berbasis inklusi, praktik langsung menjadi strategi utama dalam membentuk kompetensi dan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui teori di kelas, tetapi juga melalui kegiatan praktikum di laboratorium khusus sesuai jurusan. Implementasi praktikum di SMKN 2 Kota Malang bertujuan untuk membentuk kemandirian

peserta didik inklusif dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Koordinator Pendidikan Inklusi mengemukakan:

“Pada jurusan Perhotelan, peserta didik inklusif dilatih keterampilan housekeeping, making bed, dan laundry. Kegiatan tersebut melatih motorik siswa, ketelitian, serta membiasakan mereka bekerja secara terstruktur. Untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, peserta didik dilatih menggunakan komputer, melakukan perawatan perangkat jaringan, serta praktik teknis lainnya sesuai kompetensi jurusan. Guru Skill atau keahlian mendampingi siswa selama praktik berlangsung untuk membantu siswa memahami instruksi kerja, menyesuaikan metode pembelajaran, serta mengawasi kegiatan praktik agar siswa dapat mengikuti pelatihan dengan optimal.”⁷⁷

Guru pendamping khusus:

“Untuk perhotelan, praktik dilakukan di lab perhotelan sekolah, seperti ruang housekeeping dan laundry. Anak-anak belajar langsung menggunakan peralatan yang memang disediakan seperti di hotel. Sedangkan praktikum TKJ dilakukan di laboratorium komputer dan jaringan sekolah. Siswa inklusi tetap praktik instalasi jaringan, perawatan komputer, tapi kami sesuaikan tahapannya.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, praktik langsung bagi peserta didik inklusif dilaksanakan di laboratorium atau ruang praktik khusus yang dimiliki sekolah sesuai dengan masing-masing jurusan. Pada jurusan Perhotelan, praktik dilakukan di laboratorium perhotelan. Peserta didik inklusif dilatih melalui kegiatan praktik seperti *housekeeping*, penataan tempat tidur (*making bed*), serta pengelolaan *laundry*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, ketelitian, serta membentuk kebiasaan kerja yang terstruktur. Sementara itu, pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, peserta didik dilatih dalam

⁷⁷ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

⁷⁸ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

keterampilan pengoperasian komputer, perawatan perangkat jaringan, serta praktik teknis lainnya yang sesuai dengan kompetensi keahlian.

Dalam prosesnya, Guru Skill atau keahlian berperan aktif dalam mendampingi siswa selama kegiatan praktikum berlangsung. Pendampingan tersebut meliputi membantu memahami instruksi kerja, menyederhanakan langkah-langkah praktik, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa selama kegiatan berlangsung. Kehadiran guru skill menjadi faktor pendukung agar siswa inklusi tetap dapat mengikuti praktik secara optimal tanpa merasa tertinggal dari siswa reguler.

Sekolah melakukan pembinaan tersebut secara berkelanjutan melalui kegiatan praktik langsung di unit produksi sekolah. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dilatih untuk memahami etika kerja, tanggung jawab, serta kedisiplinan dalam bekerja. Praktikum ini menjadi salah satu strategi sekolah dalam mempersiapkan peserta didik inklusif agar mampu saat PKL, persiapan bekerja dan hidup mandiri setelah lulus.

2.) Pengembangan Soft Skill

Selain pengembangan keterampilan teknis melalui kegiatan praktikum, SMKN 2 Kota Malang juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan soft skill peserta didik inklusif. Pengembangan skill ini didampingi Guru Pendamping Khusus dan berfokus pada pembentukan karakter, kesiapan sosial, serta sikap kerja yang

dibutuhkan dalam dunia industri maupun kehidupan sehari – hari.

Koordinator Pendidikan Inklusif mengatakan :

*“Kalau praktik teknis didampingi guru jurusan, tetapi untuk pembentukan sikap dan karakter kerja lebih banyak dibina oleh Guru Pendamping Khusus. GPK membantu anak dalam membiasakan disiplin, tanggung jawab, dan cara berinteraksi yang baik.”*⁷⁹

Guru Pendamping Khusus mengemukakan:

*“Anak-anak dilatih untuk berani bertanya, menyampaikan pendapat, serta menyelesaikan tugas sampai tuntas. Soft skill seperti disiplin dan etika kerja itu kami tanamkan setiap hari melalui pembiasaan. Kami mendampingi anak bukan hanya dalam belajar, tetapi juga dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan komunikasinya.”*⁸⁰

Kepala Sekolah :

*“Di dunia kerja itu bukan hanya kemampuan teknis yang dinilai, tetapi juga sikap dan perilaku. Itu yang menjadi fokus pendampingan oleh GPK.”*⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, pengembangan soft skill di SMKN 2 Kota Malang dilaksanakan melalui pendampingan langsung oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Berbeda dengan kegiatan praktikum yang berfokus pada keterampilan teknis, pengembangan soft skill diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku, dan kesiapan sosial peserta didik inklusif. Pendampingan dilakukan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. GPK membiasakan peserta didik untuk datang tepat waktu, mematuhi tata tertib, serta menyelesaikan tugas sesuai instruksi sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran, siswa juga dilatih untuk berani bertanya,

⁷⁹ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

⁸⁰ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

⁸¹ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

menyampaikan pendapat, serta berinteraksi dengan teman dan guru secara sopan dan wajar.

Selain itu, GPK memberikan penguatan positif untuk membangun rasa percaya diri siswa, terutama bagi peserta didik yang masih ragu atau kurang berani dalam berkomunikasi. Pembiasaan tersebut dilakukan secara bertahap agar siswa mampu mengelola tugas secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pendamping.

Soft skill yang dikembangkan meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, kemampuan bersosialisasi, kepercayaan diri, kemandirian, serta etika kerja. Pembinaan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik inklusif agar tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki sikap dan karakter kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia industri maupun kehidupan setelah lulus.

b. Implementasi Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kerjasama dengan Dunia Industri

1.) Praktek Kerja Lapangan

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari pendidikan vokasional yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada peserta didik. Bagi peserta didik inklusif di SMKN 2 Kota Malang, PKL menjadi tahap penting dalam menguji kesiapan keterampilan kerja serta membangun kepercayaan diri sebelum memasuki dunia kerja. Koordinator Pendidikan Inklusif:

“Peserta didik inklusif melaksanakan PKL pada semester dua kelas dua belas. Mereka sudah dibekali keterampilan kerja sejak

pembelajaran di sekolah sehingga memiliki kesiapan untuk praktik di lapangan.”⁸²

Guru Pendampingan Khusus mengemukakan:

“Tidak semua melaksanakan PKL di perusahaan. Ada yang di dunia industri, tetapi ada juga yang praktik di unit produksi sekolah. Penempatan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik agar mereka tetap merasa aman dan dapat dipantau secara optimal. Selama PKL, kami tetap melakukan monitoring untuk memastikan anak mampu mengikuti prosedur kerja dan memahami tugas yang diberikan.”⁸³

Selanjutnya, sekolah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada peserta didik terkait pelaksanaan PKL. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai lokasi praktik, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan praktik kerja. Kegiatan sosialisasi juga menjadi sarana koordinasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua agar pelaksanaan PKL dapat berjalan secara optimal. Koordinator Pendidikan Inklusif

“Peserta didik inklusif melaksanakan PKL pada semester dua kelas dua belas. Mereka sudah dibekali keterampilan kerja sejak pembelajaran di sekolah sehingga memiliki kesiapan untuk praktik di lapangan.”⁸⁴

Program PKL bagi peserta didik inklusif dilaksanakan pada semester dua kelas XII. Sebelum mengikuti PKL, peserta didik telah mendapatkan pembelajaran keterampilan kerja melalui kegiatan praktik yang dilaksanakan selama proses pembelajaran di sekolah. Bekal keterampilan tersebut menjadi dasar kesiapan peserta didik dalam

⁸² Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

⁸³ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

⁸⁴ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

menjalankan tugas selama praktik kerja lapangan. Guru Pendamping Khusus:

“Tidak semua. Ada yang melaksanakan PKL di perusahaan, tetapi ada juga yang melaksanakan praktik di unit produksi sekolah. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik agar mereka tetap merasa aman dan dapat dipantau secara optimal.”⁸⁵

Dalam pelaksanaannya, peserta didik inklusif ditempatkan pada lokasi praktik yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Sebagian peserta didik melaksanakan PKL di perusahaan atau dunia industri yang telah bekerja sama dengan sekolah. Namun, bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang memerlukan pendampingan lebih intensif, pelaksanaan PKL dilakukan di unit produksi atau lingkungan sekolah SMKN 2 Kota Malang . Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik serta memudahkan proses pengawasan dan pendampingan oleh Guru Pendamping Khusus (GPK).

Selama pelaksanaan PKL, sekolah tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Guru Pendamping Khusus berperan dalam memastikan peserta didik mampu mengikuti kegiatan praktik sesuai prosedur kerja, membantu peserta didik dalam memahami tugas yang diberikan, serta memberikan pendampingan apabila peserta didik mengalami kesulitan selama praktik kerja berlangsung.

⁸⁵ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

2.) Kerjasama dengan DU/DI

Keberhasilan pelaksanaan PKL tidak terlepas dari kerja sama antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dalam konteks pendidikan inklusif, kerja sama ini dilakukan secara selektif untuk memastikan tempat praktik memiliki kesiapan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Humas mengemukakan:

“Biasanya pihak humas sekolah menghubungi dunia usaha dan dunia industri yang memungkinkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah ada kesepakatan, sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua mengenai pelaksanaan PKL.”⁸⁶

Koordinator Pendidikan Inklusif

“Kerja sama disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kami pastikan tempat praktiknya memahami kondisi anak.”⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik inklusif di SMKN 2 Kota Malang dilaksanakan sebagai bentuk penguatan keterampilan kerja serta persiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Program PKL dilaksanakan melalui kerja sama antara sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki kesiapan menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan kerja sama tersebut diawali dengan peran bagian Hubungan Masyarakat (Humas) sekolah yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak DUDI untuk mengetahui ketersediaan tempat praktik yang mampu menerima peserta didik inklusif. Setelah

⁸⁶ Hasil Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang, 03 Desember 2025

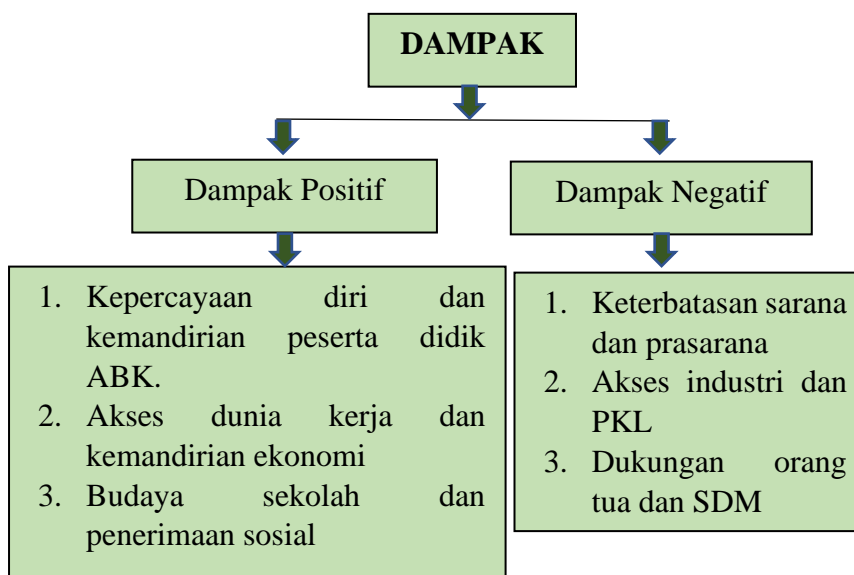
⁸⁷ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

memperoleh kesediaan dari pihak industri, sekolah melakukan kesepakatan kerja sama yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kerja sama antara sekolah dengan dunia industri tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja bagi peserta didik inklusif, tetapi juga sebagai upaya sekolah dalam mempersiapkan lulusan agar memiliki kesiapan memasuki dunia kerja. Program ini menjadi salah satu strategi sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja dan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang

Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus memberikan berbagai dampak. Dampak tersebut meliputi dampak positif yang mendukung kesiapan kerja peserta didik serta dampak negatif yang berkaitan dengan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan dampak positif dan dampak negatif dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif tersebut. Berikut bagan mengenai dampak kebijakan pendidikan inklusif terhadap aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.



Gambar 4.6 Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Dampak Positif

1.) Kepercayaan Diri dan Kemandirian Peserta Didik ABK

Kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan di SMKN 2 Kota Malang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta didik ABK dalam berbagai kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik ABK untuk tampil dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah sebagai upaya menumbuhkan rasa percaya diri. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang yang menyatakan:

“Yang kita harap itu kan kepercayaan diri. Jadi di setiap event yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, yang wajar dan bisa diikuti oleh anak-anak selalu kita lihat. Contohnya kegiatan keagamaan, ketika ustadz bertanya anak-anak ABK yang menjawab,

walaupun jawabannya belum tentu benar, tetapi keberanian itu sudah menjadi bagian keberhasilan peningkatan non-akademik.”⁸⁸

Selain melalui kegiatan ekstrakurikuler, sekolah juga menyediakan program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) yang bertujuan meningkatkan kemandirian peserta didik. Program ini dilakukan melalui pembelajaran di kelas reguler maupun kelas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ABK. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah:

“Ada ruangan khusus yang dipakai untuk merawat kebiasaan supaya mereka menjadi orang yang mandiri. Contohnya ada yang diajari membersihkan sepatu, menyetrika, mencuci, dan memasak.”⁸⁹

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendidikan Inklusif juga menunjukkan bahwa keterampilan yang diberikan kepada peserta didik tidak hanya bertujuan untuk menunjang pembelajaran akademik, tetapi juga untuk membangun kemampuan hidup mandiri.

“Contoh salah satu siswa dilatih laundry, ketika lulus dia buka usaha laundry. Ada juga yang dilatih memasak atau membuat jus sehingga ketika kemandirian mereka sudah terbentuk, mereka bisa membuka usaha dan mandiri secara finansial.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, kepercayaan diri, dan kemandirian peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang adaptif serta pemberian kesempatan untuk tampil dan

⁸⁸ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁹⁰ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik berkebutuhan khusus.

2.) Akses Dunia Kerja dan Kemandirian Ekonomi

Kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses peserta didik berkebutuhan khusus menuju dunia kerja. Sekolah secara aktif menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam proses praktik kerja lapangan (PKL), penyaluran kerja, maupun pengembangan kewirausahaan. Hal ini disampaikan oleh Humas SMKN 2 Kota Malang:

“Pokja khusus memetakan anak-anak inklusi untuk bekerja, melanjutkan kuliah, atau berwirausaha. Untuk yang berwirausaha, sekolah membimbing dan memberikan support sesuai potensi yang dimiliki, seperti melukis, fashion, atau desain. Bahkan sebelum lulus sudah ada yang bekerja dan ada juga yang membuka usaha sendiri.”⁹¹

Selain itu, sekolah juga menyediakan akses informasi lowongan kerja bagi lulusan ABK melalui pusat karir sekolah.

“Ada grup PKK (Pusat Kerja Khusus) atau career center, alumni bisa melihat lowongan pekerjaan dan sekolah tetap memantau keberlanjutan karir mereka setelah lulus.”⁹²

Koordinator Pendidikan Inklusif menambahkan bahwa beberapa alumni ABK telah berhasil bekerja di berbagai sektor pekerjaan maupun membuka usaha mandiri.

“Ada alumni tuna rungu yang bekerja di Polresta Malang, Grand Mercure Hotel, home industri sablon, menjadi tenaga administrasi di sekolah luar biasa, serta ada yang membuka usaha sendiri seperti gatehouse dan ternak lele.”⁹³

⁹¹ Hasil Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang, 03 Desember 2025

⁹² Hasil Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang, 03 Desember 2025

⁹³ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

Dari temuan tersebut dapat dianalisis bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan mampu meningkatkan peluang kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Program pembelajaran yang berbasis keterampilan vokasional serta kerja sama dengan industri memberikan pengalaman kerja nyata yang membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Selain itu, pengembangan kewirausahaan menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi peserta didik ABK.

3.) Budaya Sekolah dan Penerimaan Sosial

Penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang juga memberikan dampak positif terhadap terbentuknya budaya sekolah yang inklusif serta meningkatnya penerimaan sosial terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah secara aktif menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman melalui kegiatan sosialisasi, pembelajaran bersama, serta kegiatan sosial yang melibatkan seluruh peserta didik. Guru Pendamping Khusus menyampaikan bahwa peserta didik reguler diberikan pemahaman untuk menerima dan berinteraksi dengan peserta didik berkebutuhan khusus secara wajar.

“Mengenalkan kepada siswa reguler bahwa ada teman-teman ABK supaya mereka bisa membaaur, tidak membedakan, dan bisa berinteraksi sewajarnya.”⁹⁴

⁹⁴ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sekolah yang menegaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima dengan baik di lingkungan sekolah.

*“Banyak orang yang mengira anak ABK akan mengalami bullying, tetapi sampai sekarang tidak ada. Justru anak-anak ABK bisa berinteraksi dan bercanda dengan teman-temannya.”*⁹⁵

Selain itu, sekolah juga mengadakan kegiatan sosial seperti outbound dan gathering yang melibatkan peserta didik, guru, dan orang tua sebagai upaya memperkuat hubungan sosial.

*“Setiap tahun sekolah mengadakan kegiatan outbound atau gathering untuk membangun kenyamanan anak dan kedekatan emosional dengan guru serta teman-temannya.”*⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berdampak pada peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Budaya sekolah yang inklusif mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan sosial peserta didik berkebutuhan khusus. Penerimaan sosial yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar serta kesiapan peserta didik dalam berinteraksi di dunia kerja dan masyarakat.

⁹⁵ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁹⁶ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

b. Dampak Negatif

1.) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang memberikan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan ini terutama berkaitan dengan fasilitas pembelajaran praktik yang membutuhkan peralatan khusus, aman, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang:

“Sarana prasarana yang support dan sangat memadai kepada anak-anak ABK kami merasakan masih sangat kurang. Contohnya saat praktik memasak, alat yang digunakan belum tentu mendukung dari sisi keamanan dan keselamatan, karena anak-anak ABK membutuhkan alat yang lebih khusus.”⁹⁷

Selain itu, keterbatasan sarana juga berdampak pada proses pembelajaran praktik yang memerlukan pengulangan lebih banyak dibandingkan peserta didik reguler. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan bahan praktik menjadi lebih besar sehingga memerlukan dukungan biaya tambahan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah:

“Kalau anak non-ABK mungkin satu atau dua kali praktik sudah bisa, tetapi kalau anak ABK harus berulang-ulang. Hal itu memang diperlukan agar mereka memiliki kebiasaan dan pemahaman yang baik.”⁹⁸

⁹⁷ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

⁹⁸ Hasil Wawancara SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

Koordinator Pendidikan Inklusif juga menegaskan bahwa keterbatasan sarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

“Jika tidak ada sarana, maka pembelajaran praktik tidak bisa terlaksana. Anak ABK membutuhkan lebih banyak latihan dibandingkan anak reguler.”⁹⁹

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Keterbatasan fasilitas praktik serta kebutuhan alat yang lebih spesifik berpotensi mempengaruhi efektivitas pembelajaran keterampilan vokasional bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2.) Akses Industri dan PKL

Kendala lain dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif adalah keterbatasan akses peserta didik berkebutuhan khusus terhadap dunia industri, khususnya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL). Tidak semua dunia usaha dan dunia industri memiliki kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, maupun pemahaman dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang menyampaikan:

“Tidak semua industri mau menerima anak-anak ABK. Hanya beberapa industri saja yang terbuka. Jika tidak memungkinkan, maka sekolah memfasilitasi PKL di sekolah melalui unit produksi yang dimiliki.”¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 03 Desember 2025

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

Humas SMKN 2 Kota Malang juga menegaskan bahwa dalam menjalin kerja sama dengan industri, sekolah memerlukan waktu dan komunikasi yang panjang untuk memastikan kesiapan industri dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

“Beberapa industri membutuhkan waktu untuk mempersiapkan fasilitas dan pendampingan bagi ABK. Sekolah juga tidak bisa memaksakan kerja sama jika industri belum siap.”¹⁰¹

Selain faktor kesiapan industri, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus juga menjadi pertimbangan dalam penempatan PKL. Koordinator Pendidikan Inklusif menyampaikan bahwa beberapa peserta didik memiliki hambatan perilaku yang memerlukan pengawasan khusus.

“Masalah yang muncul biasanya terkait perilaku siswa, misalnya ada siswa yang mudah lelah atau siswa autis yang memiliki ketertarikan terhadap barang milik tamu. Oleh karena itu, sekolah harus benar-benar menyeleksi siswa yang siap untuk PKL di luar sekolah.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa keterbatasan akses industri menjadi tantangan dalam mendukung kesiapan kerja peserta didik berkebutuhan khusus. Kesiapan industri, karakteristik peserta didik, serta faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan PKL bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang, 03 Desember 2025

¹⁰² Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

3.) Dukungan Orang Tua dan SDM

Dukungan orang tua dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala terkait keselarasan antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kesinambungan pembelajaran antara sekolah dan keluarga.

*“Anak inklusi membutuhkan perhatian selama 24 jam, baik di sekolah maupun di rumah. Jika tidak ada kesamaan persepsi antara sekolah dan keluarga, maka proses pendidikan tidak akan berjalan maksimal.”*¹⁰³

Koordinator Pendidikan Inklusif juga menambahkan bahwa dukungan orang tua dalam mengulang pembelajaran di rumah menjadi faktor penting dalam perkembangan keterampilan peserta didik berkebutuhan khusus.

*“Ada orang tua yang mengulang pembelajaran anak di rumah, tetapi ada juga yang tidak, sehingga membuat anak mudah lupa terhadap keterampilan yang sudah dipelajari di sekolah.”*¹⁰⁴

Selain dukungan orang tua, keterbatasan SDM juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Tidak semua guru memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menangani peserta didik

¹⁰³ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang, 21 Januari 2026

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif, 27 November 2025

berkebutuhan khusus. Sebagaimana disampaikan oleh Guru

Pendamping Khusus:

“Tidak semua guru dapat memahami kebutuhan anak ABK. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda sehingga membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda pula.”¹⁰⁵

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa keterbatasan dukungan orang tua dan SDM menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Kurangnya kesinambungan pembelajaran antara sekolah dan keluarga serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik dapat mempengaruhi efektivitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para informan, diperoleh sejumlah temuan penting yang menjadi landasan dalam menyusun hasil penelitian ini. Adapun rincian dari temuan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Bentuk Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pendidikan inklusif bersifat prosedural dan sistematis mulai dari pra penerimaan, penjurusan, pembelajaran pasca pembelajaran. • Terdapat asesmen awal peserta didik ABK melalui observasi, wawancara orang tua, dan hasil psikotes. • Penjurusan disesuaikan dengan kemampuan vokasional peserta didik.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus, 12 Januari 2026

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran inklusif dilaksanakan melalui kelas reguler dan kelas khusus dengan pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK). • Kurikulum menggunakan kurikulum adaptif yang dimodifikasi sesuai kebutuhan peserta didik. • Terdapat program transisi menuju dunia kerja melalui pelatihan keterampilan dan kesiapan kerja.
2.	Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berbasis keterampilan vokasional dan life skill bagi peserta didik ABK. • Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai pengalaman kerja nyata bagi siswa inklusif. • Sekolah menjalin kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). • Peran Humas sekolah dalam menjalin komunikasi dan memastikan kesiapan industri menerima ABK. • Pendampingan GPK dan guru reguler dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. • Penguatan kemandirian dan kesiapan kerja melalui kegiatan praktik dan pembiasaan keterampilan hidup.
3.	Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksesibilitas Dunia Kerja Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang	Kebijakan pendidikan inklusif memberikan dampak positif berupa meningkatnya kemandirian, kepercayaan diri, dan keterampilan kerja peserta didik berkebutuhan khusus serta membuka akses menuju dunia kerja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, sumber daya pendukung, dan dunia usaha/industri yang menerima ABK.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Akseibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang

1. Kebijakan Prosedural

Bentuk kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang merupakan wujud konkret implementasi kebijakan nasional tentang pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan ini tidak dipahami sebatas kebijakan penerimaan peserta didik saja, melainkan sebagai *system* tatanan pendidikan yang dirancang secara menyeluruh sejak tahap awal masuk sekolah hingga persiapan transisi menuju dunia kerja. Dalam konteks pendidikan vokasi onal, pendidikan inklusif memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan umum, karena orientasi akhirnya tidak hanya pada capaian akademik, tetapi juga pada kesiapan kerja dan kemandirian ekonomi peserta didik.

Dalam hasil penelitian di SMKN 2 Kota Malang, bentuk kebijakan pendidikan inklusif dapat dipahami sebagai kebijakan *procedural* yang terstruktur dalam empat tahapan utama, yaitu tahap pra penerimaan siswa, tahap penerimaan dan penjurusan, tahap pembelajaran pendidikan inklusif, dan tahap pasca pembelajaran. Keempat tahapan tersebut membentuk satu kesatuan *system* kebijakan yang saling berkaitan dalam mendukung akseibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pola ini mencerminkan pendekatan kebijakan berbasis sistem (*system – bases policy approach*), di mana input, proses, dan output pendidikan dipandang sebagai

satu kesatuan yang saling memengaruhi.¹⁰⁶ Pendekatan sistemik ini juga sejalan dengan kerangka pendidikan inklusif UNESCO yang menekankan bahwa inklusi harus mencakup kebijakan, budaya sekolah, dan praktik pembelajaran secara terpadu.¹⁰⁷

Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai desain layanan pendidikan vokasional yang komprehensif dan berorientasi pada keberlanjutan akses dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

a. Pra penerimaan Siswa

Tahap pra penerimaan menjadi langkah awal dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif. Di SMKN 2 Kota Malang, Sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua, pemetaan kebutuhan calon peserta didik, serta asesmen awal yang mencakup kemampuan akademik dasar, kondisi psikososial, serta potensi vokasional. Praktik ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan sejak dini guna memastikan kesiapan sistem layanan sekolah.¹⁰⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen dilakukan melalui wawancara dengan orang tua, observasi awal, dan koordinasi dengan guru BK serta GPK. Temuan ini mengindikasikan bahwa sekolah tidak menerapkan pendekatan selektif diskriminatif, melainkan pendekatan

¹⁰⁶ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, ed. by Routledge., 2018.

¹⁰⁷ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹⁰⁸ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

kesiapan layanan (*service readiness approach*). Hal ini sangat penting karena banyak kegagalan pendidikan inklusif terjadi bukan karena keterbatasan peserta didik, melainkan karena ketidaksiapan sistem sekolah.¹⁰⁹ Dengan demikian, kesiapan layanan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Secara teoritis, praktik ini selaras dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi interaksi berbagai sistem, terutama keluarga dan sekolah.¹¹⁰ Keterlibatan orang tua dalam tahap awal menunjukkan adanya integrasi antara mikrosistem (keluarga) dan mesosistem (sekolah), yang menurut penelitian internasional terbukti meningkatkan adaptasi dan keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kebijakan kuota penerimaan yang disesuaikan dengan kapasitas GPK dan sarana praktik sebagaimana ditemukan dalam Bab IV menunjukkan penerapan prinsip *reasonable accommodation*. Penelitian lain menegaskan bahwa penerimaan peserta didik inklusif harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya agar kualitas layanan tetap terjaga.¹¹¹ Kebijakan ini juga selaras dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa sekolah inklusif wajib menyediakan dukungan yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik.¹¹²

¹⁰⁹ UNESCO, *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*, 2017.

¹¹⁰ Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development*.

¹¹¹ Budiyo, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal* (Kencana, 2017).

¹¹² Permendiknas, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa'.

Dalam praktik pendidikan inklusif di Indonesia menemukan bahwa proses identifikasi dan asesmen awal menjadi faktor penentu keberhasilan layanan inklusif di sekolah reguler.¹¹³ Tanpa asesmen yang tepat, peserta didik berisiko mengalami kesulitan adaptasi akademik maupun sosial. Selain itu, pentingnya proses identifikasi dan asesmen awal dalam pendidikan inklusif juga diperkuat oleh berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian mengenai strategi penerimaan peserta didik pada sekolah inklusif menunjukkan bahwa tahap observasi awal dan asesmen menjadi bagian penting dalam proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus.¹¹⁴ Melalui proses tersebut, sekolah dapat mengidentifikasi kemampuan, kebutuhan belajar, serta bentuk layanan pendidikan yang tepat bagi peserta didik. Proses identifikasi ini bertujuan agar sekolah dapat menyesuaikan program pembelajaran, layanan pendampingan, serta penempatan kelas sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, asesmen awal tidak dimaksudkan sebagai bentuk seleksi diskriminatif, tetapi sebagai langkah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan mampu mendukung perkembangan akademik maupun sosial peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal.¹¹⁵

¹¹³ Sunardi,dkk ‘Manajemen Pendidikan Inklusif’, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud*, 2011.

¹¹⁴ Widya Rahmawati Al-Nur, ‘Strategi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Inklusi Di School Of Human Jatisampurna Bekasi’, 9.1 (2023), pp. 29–47.

¹¹⁵ Reza Dulisanti, ‘Penerimaan Sosial Dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif Di Smk Negeri 2 Malang)’, pp. 52–60.

Oleh karena itu, asesmen di SMKN 2 Kota Malang dilakukan bukan sebagai alat seleksi diskriminatif, melainkan sebagai dasar penyusunan strategi layanan individual.

Temuan penelitian ini mendukung kebijakan SMKN 2 Kota Malang yang menetapkan kuota penerimaan berdasarkan kapasitas layanan. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian agar hak pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kualitas layanan. Jika dianalisis melalui *social model of disability* (Oliver, 1990), kebijakan pra penerimaan di SMKN 2 Kota Malang mencerminkan pergeseran paradigma dari model medis ke model sosial.¹¹⁶ Sekolah tidak memandang disabilitas sebagai hambatan individual, melainkan sebagai kondisi yang memerlukan penyesuaian sistem pendidikan. Dengan demikian, tahap pra penerimaan menjadi fondasi kebijakan yang memastikan bahwa proses inklusi berjalan secara terencana, sistematis dan berbasis kesiapan layanan.

b. Penerimaan dan Penjurusan

Penerimaan dan penjurusan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan implementasi kebijakan inklusif yang bersifat selektif dan adaptif. Sekolah tidak hanya membuka akses administratif, tetapi melakukan assessment awal melalui observasi wawancara orang tua, serta pertimbangan hasil psikotes dan pemeriksaan dokter. Dalam perspektif teori pada Bab II, mekanisme ini mencerminkan kombinasi *medical model of disability*

¹¹⁶ Oliver, *The Politics of Disablement*.

dan *social model of disability*. Penggunaan hasil medis dan psikotes menunjukkan orientasi pada identifikasi kondisi individu sebagai dasar penentuan layanan.¹¹⁷ Namun, ketika sekolah mempertimbangkan kesiapan sarana, kurikulum, serta kemampuan guru sebelum menerima siswa, hal tersebut menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada sistem pendidikan.¹¹⁸

Penempatan siswa pada jurusan Perhotelan dan Teknik Komunikasi dan Jaringan (TKJ) dilakukan berdasarkan kemampuan kognitif, keterampilan fungsional, dan kesiapan belajar. Siswa dengan hambatan kecerdasan diarahkan pada jurusan berbasis praktik seperti Perhotelan dengan modifikasi kurikulum, sedangkan siswa tanpa hambatan kecerdasan seperti tuna rungu ditempatkan pada TKJ dengan penyesuaian metode pembelajaran yang lebih visual. Praktik ini sejalan dengan teori *Individualized Instruction* dalam pendidikan inklusif yang menekankan diferensiasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa.¹¹⁹

Penelitian tentang pendidikan vokasional bagi siswa disabilitas menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa agar dapat mendukung kesiapan kerja setelah lulus. Hal ini sejalan dengan praktik di SMKN 2 Kota Malang yang menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan vokasionalnya.¹²⁰ Penelitian lain

¹¹⁷ WHO, 'Towards a Common Language for Functioning , Disability and Health ICF'.

¹¹⁸ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹¹⁹ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹²⁰ Leni Ambar Cahyani, 'Pendidikan Kewirausahaan Bagi Siswa Disabilitas Melalui Pembelajaran Vokasional : Analisis Pengalaman Guru', 22 (2025), pp. 12–19.

menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh modifikasi kurikulum, dukungan guru pendamping khusus, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Temuan ini sejalan dengan implementasi pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang yang menerapkan penyesuaian pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.¹²¹

Keberhasilan pendidikan inklusif di SMK sangat bergantung pada asesmen awal dan penempatan jurusan berbasis kemampuan vokasional siswa. Penelitian lain menunjukkan bahwa modifikasi kurikulum dan kolaborasi dengan orang tua menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan ABK pada pendidikan inklusif.¹²² Dengan demikian, kebijakan penerimaan dan penjurusan di SMKN 2 Kota Malang dapat dipahami sebagai strategi adaptif yang mengintegrasikan prinsip inklusi, diferensiasi pembelajaran, serta orientasi kesiapan kerja.

c. Pembelajaran Pendidikan Inklusif

Pembelajaran pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang yang dilaksanakan melalui sistem kelas reguler dan kelas khusus secara fleksibel serta didukung oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) menunjukkan implementasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik. Model ini sejalan dengan teori pendidikan inklusif pada Bab II yang menekankan diferensiasi kurikulum dan penyesuaian layanan sesuai kemampuan siswa, serta

¹²¹ Desy Rismayanti dan Endang Poerwanti, 'Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMKN 2 Malang', *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2020.

¹²² Nurul Hidayanti Qomariah, Lina Revilla Malik, and Imma Syakiro, 'Strategi Penyesuaian Kurikulum Inklusi Melalui Pendekatan Fleksibel Dan Adaptif', 5 (2025), pp. 1890–99.

mencerminkan *Social Model of Disability* yang memandang hambatan belajar sebagai akibat keterbatasan sistem, sehingga perlu diatasi melalui modifikasi lingkungan dan metode pembelajaran.¹²³ Dukungan profesional melalui kolaborasi GPK dan guru reguler juga sesuai dengan pedoman UNESCO yang menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kerja sama dalam keberhasilan sekolah inklusif.¹²⁴ Temuan ini diperkuat oleh Sunardi dkk. yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh ketersediaan guru pendamping dan adaptasi kurikulum.¹²⁵

1.) Pembelajaran di kelas khusus dengan Guru Pendamping Khusus

Pembelajaran di kelas khusus dengan pedampingan Guru Pendamping Khusus (GPK) di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang adaptif, fleksibel, dan berbasis kebutuhan individual. Penempatan siswa secara selektif antara kelas reguler dan kelas khusus, termasuk pemberian jam belajar berbeda bagi siswa dengan hambatan kecerdasan, mencerminkan prinsip diferensiasi kurikulum dan *individualized instruction* sebagaimana dijelaskan dalam teori pendidikan inklusif pada Bab II. Modifikasi materi pada mata pelajaran yang bersifat abstrak seperti Matematika dan Bahasa Inggris menjadi lebih sederhana serta berorientasi pada keterampilan hidup menunjukkan

¹²³ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹²⁴ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹²⁵ Sunardi, 'Manajemen Pendidikan Inklusif'.

bahwa sekolah tidak menurunkan hak belajar siswa, tetapi menyesuaikan pendekatan agar lebih fungsional dan bermakna. Praktik ini sejalan dengan *Social Model of Disability* yang memandang hambatan belajar sebagai akibat keterbatasan sistem pembelajaran sehingga perlu diatasi melalui adaptasi lingkungan dan metode mengajar.¹²⁶

Peran sentral GPK yang tidak hanya mendampingi aspek akademik, tetapi juga perkembangan emosional dan sosial siswa, memperlihatkan pentingnya dukungan profesional dalam menciptakan pembelajaran inklusif yang efektif.¹²⁷ Kebijakan evaluasi melalui penyusunan soal oleh GPK bersama guru reguler serta status kelulusan “Tamat Belajar” juga mencerminkan prinsip keadilan (*equity*), yaitu pemberian penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan siswa tanpa mengabaikan standar pendidikan.¹²⁸ Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sunardi dkk. yang menyatakan bahwa fleksibilitas pembelajaran, kolaborasi guru, dan ketersediaan guru pendamping merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.¹²⁹ serta penelitian lain yang menegaskan bahwa model kelas kombinasi (reguler–khusus) efektif dalam menjaga keseimbangan antara integrasi sosial dan pemenuhan kebutuhan individual siswa ABK.¹³⁰

¹²⁶ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹²⁷ UNESCO, ‘Policy Guidelines on Inclusion in Education’.

¹²⁸ Asikin, *Penerapan Metode Experiential Learning Berbasis Scans Untuk Meningkatkan Kemampuan Eksplorasi Karier Siswa Tunarungu Di SLBN 1 Makassar Application*, XI.

¹²⁹ Sunardi, ‘Manajemen Pendidikan Inklusif’.

¹³⁰ Euis Mintarsih and Guru, ‘Pengelolaan Kelas Di Sekolah Inklusi’, *Jurnal Untirta*.

2.) Pembelajaran di kelas reguler dengan pendamping Guru Pendamping Khusus

Pembelajaran di kelas reguler dengan pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pelaksanaan pembelajaran vokasional di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan implementasi pendidikan inklusif yang menekankan integrasi sosial dan kesiapan kerja. Siswa ABK tetap mengikuti praktik bersama siswa reguler dengan pendampingan khusus serta pembekalan *soft skill* dan *hard skill* sebelum memasuki praktik kerja industri, yang dalam beberapa kasus dilaksanakan di lingkungan sekolah demi menjamin rasa aman dan kemudahan pengawasan. Model ini sejalan dengan teori pendidikan inklusif pada Bab II yang menekankan prinsip *least restrictive environment*, yakni peserta didik belajar bersama dalam lingkungan yang sama dengan dukungan yang diperlukan.¹³¹ Praktik ini juga mencerminkan *Social Model of Disability*, karena sekolah melakukan adaptasi sistem dan lingkungan kerja agar hambatan dapat diminimalisasi.¹³² Selain itu, integrasi sosial melalui pengenalan siswa ABK kepada siswa reguler memperkuat pembentukan budaya inklusif dan mengurangi potensi diskriminasi, sebagaimana ditegaskan UNESCO bahwa interaksi sosial dalam kelas reguler menjadi elemen penting dalam membangun sikap penerimaan dan kesetaraan.¹³³ Temuan ini diperkuat oleh penelitian

¹³¹ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹³² Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹³³ UNESCO, *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*.

Wehman, 2013 yang menyatakan bahwa pembelajaran vokasional inklusif dengan pendampingan dan pelatihan transisi kerja meningkatkan kesiapan siswa disabilitas memasuki dunia kerja¹³⁴, serta penelitian Sunardi dkk. yang menegaskan bahwa dukungan guru pendamping dan lingkungan belajar yang inklusif berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan siswa ABK di sekolah menengah.¹³⁵

3.) Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran inklusif di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan penggunaan kurikulum adaptif yang disusun melalui kolaborasi antara Guru Pendamping Khusus (GPK) dan guru reguler. Penyesuaian dilakukan melalui bentuk duplikasi, modifikasi, substitusi, dan komisi kurikulum sesuai dengan kemampuan serta karakteristik peserta didik. Peserta didik tanpa hambatan kecerdasan mengikuti kurikulum reguler dengan penyesuaian tertentu, sedangkan peserta didik dengan hambatan kecerdasan lebih diarahkan pada penguatan keterampilan kerja sederhana dan keterampilan hidup. Praktik ini sejalan dengan teori diferensiasi kurikulum dalam pendidikan inklusif pada Bab II yang menekankan pentingnya adaptasi isi, proses, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual.¹³⁶

Pendekatan ini juga mencerminkan *Social Model of Disability*, di

¹³⁴ Paul Wehman, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities* (Paul H. Brookes Publishing, 2013).

¹³⁵ Sunardi, 'Manajemen Pendidikan Inklusif'.

¹³⁶ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

mana hambatan belajar diatasi melalui modifikasi sistem pembelajaran, bukan dengan mengecualikan peserta didik dari kurikulum utama.¹³⁷ UNESCO menegaskan bahwa kurikulum fleksibel dan responsif merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif.¹³⁸ Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sunardi dkk yang menyatakan bahwa keberhasilan sekolah inklusif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam melakukan adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa¹³⁹, serta penelitian Mulyono yang menunjukkan bahwa kurikulum berbasis keterampilan hidup efektif dalam meningkatkan kemandirian peserta didik dengan hambatan intelektual.¹⁴⁰

d. Pasca Pembelajaran

Tahap pasca pembelajaran dalam kebijakan prosedural pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang berfokus pada persiapan transisi siswa menuju dunia kerja, pendidikan lanjutan, atau kemandirian berwirausaha dan evaluasi hasil pembelajaran

1.) Persiapan Transisi Siswa

Persiapan transisi siswa ABK di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi berlanjut hingga tahap

¹³⁷ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹³⁸ UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All* (UNESCO, 2020).

¹³⁹ Sunardi, 'Manajemen Pendidikan Inklusif'.

¹⁴⁰ Anna Nisrina Zulfa, 'Kurikulum Berbasis Keterampilan Hidup:Menyiapkan Siswa Berkebutuhan Khusus Menuju Kemandirian', 2025.

keberlanjutan lulusan. Sekolah menyediakan pusat karir (*PKK/Career Center*), grup alumni, serta menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi untuk membuka akses kerja maupun studi lanjut. Pemantauan lulusan juga dilakukan untuk mengetahui apakah alumni bekerja, melanjutkan pendidikan, atau berwirausaha sesuai potensi yang telah dipetakan selama tiga tahun masa pendidikan. Praktik ini sejalan dengan teori *transition to work* dalam Bab II yang menekankan pentingnya perencanaan transisi terstruktur bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mampu mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.¹⁴¹ Selain itu, kebijakan tersebut mencerminkan *Social Model of Disability*, karena sekolah berupaya membuka akses dan mengurangi hambatan struktural dalam dunia kerja melalui jejaring kemitraan.¹⁴² UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif yang efektif harus mencakup dukungan transisi menuju dunia kerja atau pendidikan lanjutan.¹⁴³ Temuan ini diperkuat oleh Wehman, 2006 yang menyatakan bahwa program transisi berbasis sekolah dan kemitraan industri meningkatkan peluang kerja bagi siswa disabilitas¹⁴⁴, serta penelitian Sunardi dkk yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia diukur dari keberlanjutan lulusan dalam dunia kerja dan kemandirian.¹⁴⁵

¹⁴¹ Wehman, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities*.

¹⁴² Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁴³ UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*.

¹⁴⁴ Wehman, 'Transition from School to Work: New Challenges and Goals for Rehabilitation'.

¹⁴⁵ Sunardi, 'Manajemen Pendidikan Inklusif'.

2.) Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi hasil pembelajaran di SMKN 2 Kota Malang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui evaluasi harian, tengah semester, akhir semester, serta evaluasi perkembangan berkala bagi peserta didik inklusi. Indikator yang digunakan tidak hanya menilai capaian akademik, tetapi juga perkembangan sikap, keterampilan praktik, dan kemandirian, dengan tolok ukur utama berupa peningkatan (progress) sesuai kemampuan awal siswa. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran dan Guru Pendamping Khusus (GPK), sedangkan keputusan strategis seperti kenaikan kelas dan kelulusan ditetapkan melalui rapat dewan guru guna menjamin objektivitas. Model ini sejalan dengan teori asesmen autentik dan evaluasi berbasis perkembangan dalam pendidikan inklusif pada Bab II, yang menekankan bahwa penilaian harus fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik individu.¹⁴⁶ Pendekatan tersebut juga mencerminkan prinsip *equity* dalam *Social Model of Disability*, yaitu memberikan penilaian yang adil melalui penyesuaian sistem, bukan menyeragamkan standar bagi seluruh siswa.¹⁴⁷ UNESCO menegaskan bahwa sistem evaluasi inklusif harus menilai proses dan perkembangan, bukan hanya hasil akhir.¹⁴⁸ Dengan demikian bahwa keberhasilan pendidikan inklusif ditentukan oleh sistem evaluasi kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa ABK.

¹⁴⁶ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹⁴⁷ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁴⁸ UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All*.

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Aksebilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi dalam aksebilitas dunia kerja di SMKN 2 Kota Malang berfokus pada dua pelaksanaan yaitu pelatihan life skill dan kemandirian kerja serta implementasi program kerja lapangan (PKL) dan kerjasama dengan dunia industri. Kedua pelaksanaan ini bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan implementasi dari prinsip *inclusive education* yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dalam transisi menuju dunia kerja.

1. Implementasi Pelatihan Life Skill dan Kemandirian Kerja

a. Praktikum

Implementasi pelatihan *life skill* dan kemandirian kerja melalui kegiatan praktikum di SMKN 2 Kota Malang menunjukkan bahwa pendidikan vokasional inklusif diarahkan pada pembentukan kompetensi fungsional dan kesiapan kerja nyata. Praktikum di laboratorium Perhotelan (housekeeping, *making bed*, laundry) dan Teknik Komputer dan Jaringan (instalasi dan perawatan perangkat) dilaksanakan dengan pendampingan Guru Skill serta penyesuaian tahapan kerja sesuai kemampuan siswa ABK. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan vokasional berbasis keterampilan dalam Bab II yang menekankan pembelajaran kontekstual dan *learning by doing* sebagai strategi efektif dalam membangun kemandirian dan kebiasaan kerja terstruktur.¹⁴⁹ Praktik adaptif tersebut juga mencerminkan *Social*

¹⁴⁹ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

Model of Disability, karena sekolah menyesuaikan metode, instruksi, dan lingkungan praktik agar hambatan belajar dapat diminimalkan.¹⁵⁰ Selain itu, pelatihan berkelanjutan melalui unit produksi sekolah memperlihatkan penerapan konsep *transition to work*, yakni pembekalan keterampilan teknis dan etika kerja sebagai persiapan memasuki dunia industry.¹⁵¹ Temuan ini diperkuat oleh Wehman yang menyatakan bahwa pelatihan kerja berbasis praktik langsung meningkatkan peluang kerja dan kemandirian penyandang disabilitas.¹⁵² Dengan demikian pembelajaran berbasis praktik dan pendampingan guru menjadi faktor penting keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah menengah.

b. Pengembangan Soft Skill

Pengembangan *soft skill* peserta didik inklusif di SMKN 2 Kota Malang dilaksanakan secara sistematis melalui pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berfokus pada pembentukan karakter, kesiapan sosial, dan etika kerja. Pembiasaan disiplin, tanggung jawab, keberanian berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta penyelesaian tugas hingga tuntas dilakukan dalam aktivitas harian sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran nonakademik. Strategi ini sejalan dengan teori pendidikan vokasional pada Bab II yang menegaskan bahwa kesiapan kerja (*work readiness*) tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis (*hard skill*), tetapi juga oleh

¹⁵⁰ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁵¹ National Council on Disability, 'The Rehabilitation Act: Outcomes for Transition-Age Youth', 2008, p. 132.

¹⁵² Wehman, 'Transition from School to Work: New Challenges and Goals for Rehabilitation'.

kompetensi nonteknis seperti komunikasi, sikap kerja, dan pengendalian emosi.¹⁵³ Pendekatan tersebut juga mencerminkan *Social Model of Disability*, karena sekolah membangun lingkungan suportif yang membantu peserta didik mengembangkan potensi sosial-emosionalnya melalui pembiasaan dan penguatan positif, bukan berfokus pada keterbatasannya.¹⁵⁴ UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif yang berkualitas harus mendorong partisipasi aktif, rasa percaya diri, dan keterlibatan sosial siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, dalam perspektif teori *transition to work*, pembinaan *soft skill* merupakan komponen penting dalam mempersiapkan peserta didik disabilitas memasuki dunia kerja dan kehidupan mandiri. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wehman yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan etika kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penempatan kerja penyandang disabilitas.¹⁵⁵ Maka pembinaan karakter dan dukungan pendamping berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan *soft skill* di SMKN 2 Kota Malang menjadi strategi integral dalam membangun kesiapan kerja dan kemandirian peserta didik inklusif secara berkelanjutan.

2. Implementasi Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kerjasama dengan Dunia Industri

¹⁵³ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹⁵⁴ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁵⁵ Wehman, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities*.

a. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik inklusif di SMKN 2 Kota Malang merupakan bentuk implementasi pendidikan vokasional inklusif yang terintegrasi dengan perencanaan transisi kerja. Penempatan peserta didik dilakukan secara selektif di perusahaan mitra maupun unit produksi sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan, kesiapan emosional, serta kebutuhan pendampingan. Kebijakan ini sejalan dengan teori *School-to-Work Transition* yang menekankan pentingnya pengalaman kerja nyata, dukungan sistematis, dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapan kerja penyandang disabilitas.¹⁵⁶ Pendekatan tersebut juga mencerminkan *Social Model of Disability*, karena sekolah melakukan adaptasi lingkungan praktik serta menyediakan monitoring oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) guna meminimalisasi hambatan structural.¹⁵⁷ Secara konseptual, praktik ini sejalan dengan pandangan David Mitchell yang menekankan bahwa pendidikan inklusif yang efektif harus mengombinasikan dukungan individual, modifikasi lingkungan, dan kemitraan eksternal.¹⁵⁸ Maka program transisi berbasis pengalaman kerja langsung dan keterlibatan industri memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kerja siswa disabilitas pasca kelulusan.

¹⁵⁶ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹⁵⁷ Anastasiou and Kauffman, 'The Social Model of Disability: Dichotomy between Impairment and Disability'.

¹⁵⁸ David Mitchell, *What Really Works in Special and Inclusive Education* (Routledge, 2014).

Dalam konteks Indonesia, temuan ini diperkuat oleh Sunardi dkk. yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah menengah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendampingan dan kemitraan dengan dunia usaha.¹⁵⁹ Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja berbasis sekolah (*school-based enterprise*) efektif meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi kerja siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, studi oleh Hidayat menegaskan bahwa model PKL adaptif yang disesuaikan dengan kemampuan individu mampu memperluas peluang kerja bagi lulusan ABK di SMK inklusif.¹⁶⁰ Dengan demikian, pelaksanaan PKL di SMKN 2 Kota Malang bukan sekadar pemenuhan kurikulum, tetapi menjadi strategi sistematis dalam membangun kepercayaan diri, kompetensi vokasional, serta aksesibilitas dunia industri bagi peserta didik inklusif.

b. Kerjasama dengan DU/DI

Kerjasama antara SMKN 2 Kota Malang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam pelaksanaan PKL bagi peserta didik inklusif menunjukkan adanya strategi kemitraan yang terencana dan selektif. Melalui peran Humas, sekolah melakukan komunikasi awal untuk memastikan kesiapan industri dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan pendampingan siswa. Langkah ini sejalan dengan teori *school-industry partnership* dalam pendidikan vokasional yang menekankan pentingnya kolaborasi institusional untuk menjembatani

¹⁵⁹ Sunardi, 'Manajemen Pendidikan Inklusif'.

¹⁶⁰ Hidayat, dkk 'Transisi Kerja Lulusan Pendidikan Inklusif', *Jurnal Pendidikan Khusus*, 2019.

kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.¹⁶¹ Dalam perspektif *Social Model of Disability*, upaya memastikan kesiapan tempat praktik mencerminkan adaptasi lingkungan kerja agar lebih aksesibel dan inklusif, bukan menempatkan hambatan pada¹⁶². David Mitchell juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh dukungan eksternal dan jejaring kerja sama yang memungkinkan partisipasi nyata peserta didik dalam konteks sosial yang lebih luas.¹⁶³

Kemitraan dengan DUDI merupakan faktor penting dalam memperluas peluang kerja lulusan sekolah inklusif. Penelitian oleh Anggraeni menunjukkan bahwa keberhasilan PKL siswa berkebutuhan khusus di SMK sangat dipengaruhi oleh kesiapan industri, komunikasi yang intensif, serta monitoring berkelanjutan dari pihak sekolah.¹⁶⁴ Dengan demikian, kerja sama SMKN 2 Kota Malang dengan DUDI bukan sekadar formalitas administratif, melainkan strategi sistematis dalam memperluas aksesibilitas dunia kerja dan memperkuat implementasi pendidikan inklusif.

¹⁶¹ Wehman, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities*.

¹⁶² Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁶³ Mitchell, *What Really Works in Special and Inclusive Education*.

¹⁶⁴ Nurrisma dan Sujarwanto Anggraeni, 'Pengelolaan Kemitraan Sekolah Inklusif Dengan DUDI (Studi Kasus Di SMKN 8 Surabaya)', *E-Journal.Unesa*, 2024.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Dampak Positif

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri, kemandirian, serta akses dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Dampak tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berorientasi pada pemerataan akses pendidikan, tetapi juga pada pemberdayaan individu agar mampu berpartisipasi secara sosial dan ekonomi setelah lulus.

Peningkatan kepercayaan diri terlihat dari keberanian peserta didik ABK dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan sekolah. Lingkungan yang menerima keberagaman memungkinkan mereka merasa aman dan dihargai. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memperluas partisipasi dan mengurangi eksklusi dalam sistem pendidikan.¹⁶⁵ Ainscow juga menyatakan bahwa budaya sekolah yang inklusif berperan penting dalam membentuk rasa percaya diri dan partisipasi aktif peserta didik.¹⁶⁶ Dalam perspektif psikologi perkembangan, dukungan sosial dari guru dan teman sebaya membantu membangun konsep diri positif yang menjadi fondasi kesiapan memasuki dunia kerja.¹⁶⁷

¹⁶⁵ UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education'.

¹⁶⁶ M Ainscow, 'Developing Inclusive Education Systems', *European Journal of Special Needs Education*, 2005.

¹⁶⁷ E. B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach* (McGraw-Hill, 1990).

Selain aspek psikologis, kebijakan inklusif juga berdampak pada peningkatan kemandirian melalui pelatihan life skill dan keterampilan vokasional. Pendidikan kejuruan inklusif menekankan pengembangan kecakapan hidup dan kesiapan kerja sebagai bagian dari proses transisi menuju kemandirian dewasa.¹⁶⁸ Program PKL, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta pendampingan karier mencerminkan pendekatan *school-to-work transition* yang efektif. Wehman menjelaskan bahwa pengalaman kerja terstruktur dan dukungan transisi sangat menentukan keberhasilan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.¹⁶⁹

Keberhasilan alumni ABK yang bekerja atau membuka usaha sendiri menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)¹⁷⁰ serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam memastikan akses yang setara terhadap peluang kerja.¹⁷¹

Jika dianalisis menggunakan *social model of disability*, hambatan yang dialami penyandang disabilitas bukan semata-mata terletak pada kondisi individu, tetapi pada sistem dan lingkungan yang tidak

¹⁶⁸ OECD, 'Succeeding in the Labour Market: Inclusive Education and Vocational Training', 2010.

¹⁶⁹ Wehman, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities*.

¹⁷⁰ NATIONS, '10 Years of Convention on the Rights of Persons With Disabilities'.

¹⁷¹ UURI, 'UURI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', 2016.

aksesibel.¹⁷² Kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang telah berupaya mengurangi hambatan struktural tersebut melalui adaptasi pembelajaran, dukungan guru, dan jejaring industri. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Booth dan Ainscow bahwa inklusi adalah proses peningkatan partisipasi sekaligus pengurangan hambatan belajar dan berpartisipasi.¹⁷³

Dengan demikian, dampak positif kebijakan pendidikan inklusif mencakup penguatan aspek psikologis, keterampilan, dan akses sosial-ekonomi yang terintegrasi. Pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai strategi sistemik dalam mewujudkan aksesibilitas dunia kerja yang lebih adil dan setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Dampak Negatif

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang memberikan berbagai manfaat, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada optimalisasi aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya akses industri dalam pelaksanaan PKL, serta dukungan orang tua dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya optimal. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukung secara menyeluruh.

¹⁷² Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁷³ M. Booth, T., & Ainscow, *Index for Inclusion* (CSIE, 2011).

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama dalam pembelajaran praktik berbasis vokasional. Peserta didik ABK membutuhkan alat yang lebih aman, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka. Selain itu, proses pembelajaran yang memerlukan pengulangan lebih intensif menyebabkan kebutuhan bahan praktik dan pembiayaan menjadi lebih besar. Secara teoretis, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif memerlukan dukungan sistem, termasuk fasilitas yang aksesibel dan memadai.¹⁷⁴ Dalam perspektif *social model of disability*, hambatan bukan semata-mata terletak pada kondisi individu, melainkan pada lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung.¹⁷⁵ Dengan demikian, keterbatasan fasilitas praktik dapat dipahami sebagai hambatan struktural yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penguasaan keterampilan kerja.

Selain faktor fasilitas, keterbatasan akses terhadap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan PKL. Tidak semua industri memiliki kesiapan fasilitas, pemahaman, maupun SDM untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Akibatnya, sekolah harus melakukan seleksi ketat terhadap peserta didik yang dinilai siap, atau menyediakan alternatif PKL di unit produksi sekolah. Dalam teori *school-to-work transition*, keberhasilan kerja penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan kerja dan kesiapan pemberi kerja.¹⁷⁶ Ketika industri belum inklusif, maka

¹⁷⁴ UNESCO, *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*.

¹⁷⁵ Oliver, *The Politics of Disablement*.

¹⁷⁶ Wehman, 'Transition from School to Work: New Challenges and Goals for Rehabilitation'.

peluang peserta didik ABK untuk memperoleh pengalaman kerja nyata menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan dalam akses kerja bersifat sistemik dan berkaitan dengan struktur pasar kerja yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.

Di sisi lain, dukungan orang tua dan kesiapan SDM sekolah juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan inklusif. Peserta didik ABK membutuhkan penguatan pembelajaran secara berkelanjutan di rumah agar keterampilan yang telah dipelajari tidak mudah hilang. Namun, tidak semua orang tua memiliki waktu, pemahaman, atau kemampuan untuk memberikan pendampingan yang konsisten. Epstein menjelaskan bahwa kemitraan antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan peserta didik. Ketidaksinambungan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah dapat menghambat perkembangan keterampilan dan kemandirian peserta didik.

Selain itu, keterbatasan kompetensi guru dalam memahami karakteristik dan strategi pembelajaran bagi ABK juga menjadi tantangan. Florian dan Black-Hawkins menegaskan bahwa praktik inklusif membutuhkan guru yang memiliki kesiapan pedagogis dan kemampuan melakukan diferensiasi pembelajaran.¹⁷⁷ Tanpa pelatihan dan dukungan profesional yang memadai, implementasi pendidikan inklusif berpotensi tidak berjalan optimal, khususnya dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tuntutan dunia kerja.

¹⁷⁷ K. Florian, L., & Black-Hawkins, 'Exploring Inclusive Pedagogy', *Cambridge Journal of Education*, 2011.

Dengan demikian, dampak negatif kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang lebih bersifat struktural dan sistemik daripada individual. Keterbatasan fasilitas, akses industri, dukungan keluarga, dan kompetensi SDM menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusif masih memerlukan penguatan pada level dukungan sistem. Tantangan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus hanya dapat terwujud secara optimal apabila terdapat sinergi antara sekolah, keluarga, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang benar-benar inklusif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai kebijakan pendidikan inklusif untuk aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang diwujudkan dalam bentuk kebijakan prosedural yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif secara sistematis. Kebijakan tersebut meliputi tahap pra penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus melalui proses asesmen awal, tahap penerimaan dan penjurusan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, pelaksanaan pembelajaran inklusif baik di kelas reguler maupun kelas khusus dengan pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan kurikulum penyesuaian kurikulum, serta tahap pasca pembelajaran yang mencakup evaluasi hasil belajar dan persiapan transisi peserta didik menuju dunia kerja. Kebijakan ini dirancang dengan mengacu pada regulasi pemerintah serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah.
2. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam mendukung aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan melalui berbagai program yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja. Implementasi tersebut meliputi pembelajaran inklusif berbasis keterampilan vokasional, pelatihan life skill, penguatan kemandirian peserta didik,

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Implementasi tersebut menunjukkan bahwa sekolah berupaya menjembatani pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui penguatan keterampilan praktis, pengalaman kerja, serta pembentukan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada kesiapan transisi peserta didik menuju dunia kerja.

3. Dampak kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri dan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus, terbukanya akses pengalaman kerja melalui program PKL, serta terbentuknya budaya sekolah yang lebih inklusif dan menerima keberagaman. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusif, serta masih terbatasnya akses industri yang bersedia menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan praktik kerja maupun peluang kerja setelah lulus. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah, tetapi juga pada dukungan sistem pendidikan dan dunia kerja secara lebih luas.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan inklusif di SMKN 2 Kota Malang telah berperan dalam meningkatkan kesiapan peserta didik berkebutuhan khusus untuk memasuki dunia kerja, meskipun dalam

implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi sarana, sumber daya manusia, serta perluasan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan pendidikan inklusif dalam aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SMKN 2 Kota Malang, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif, terutama dalam penguatan sarana dan prasarana pembelajaran praktik yang lebih adaptif dan aman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini penting karena pembelajaran vokasional bagi peserta didik ABK memerlukan alat praktik yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan serta proses latihan yang lebih intensif dibandingkan siswa reguler. Selain itu, sekolah juga perlu meningkatkan pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan pendidikan inklusif agar seluruh guru memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan metode pembelajaran yang sesuai. Penguatan koordinasi antara Guru Pendamping Khusus, guru mata pelajaran, serta pihak humas juga perlu terus dikembangkan guna memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam membuka peluang praktik kerja lapangan maupun peluang kerja bagi lulusan ABK.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah menengah kejuruan, khususnya dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang aksesibel serta peningkatan jumlah dan kompetensi Guru Pendamping Khusus. Dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai sangat diperlukan agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap dunia usaha dan dunia industri agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting mengingat masih terbatasnya industri yang siap menerima peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan praktik kerja maupun pekerjaan setelah lulus.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu sekolah, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pendidikan inklusif secara lebih luas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada lebih banyak sekolah atau wilayah yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pendidikan inklusif dalam mendukung aksesibilitas dunia kerja bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung keberhasilan transisi peserta didik berkebutuhan khusus dari

dunia pendidikan menuju dunia kerja, serta meneliti keberlanjutan karier lulusan ABK setelah mereka memasuki dunia kerja atau menjalankan usaha mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Permendikbudristek Nomor 48 Tahun, 'Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi', *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3.1 (2023), p. 7, doi:10.35473/ijec.v3i1.828
- Achmad Nur Taufik, Tjitjik Rahaju, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Mewujudkan Sma Di Surabaya', <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/39477>, 2021, pp. 139–54
- Ahmad Mikail, 'Model Pendidikan Inklusif Dalam Upaya Menyiapkan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Pendidik Profesional (Studi', 3.5 (2021), p. 6
- Ainscow, M, 'Developing Inclusive Education Systems', *European Journal of Special Needs Education*, 2005
- Al-Nur, Widya Rahmawati, 'Strategi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Inklusi Di School Of Human Jatisampurna Bekasi', 9.1 (2023), pp. 29–47
- Alfiansyah, M I, 'Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Malang', 2019 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16923>>
- Anastasiou, Dimitris, and James M. Kauffman, 'The Social Model of Disability: Dichotomy between Impairment and Disability', *Journal of Medicine and Philosophy (United Kingdom)*, 38.4 (2013), pp. 441–59, doi:10.1093/jmp/jht026
- Anggraeni, Nurrisma dan Sujarwanto, 'Pengelolaan Kemitraan Sekolah Inklusif Dengan DUDI (Studi Kasus Di SMKN 8 Surabaya)', *E-Journal.Unesa*, 2024
- Arianto, Bambang, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*, Borneo Novelty Publishing, 2024, 10.70310/Q, doi:10.70310/q81zdh33
- Asikin, Nurul, *Penerapan Metode Experiential Learning Berbasis Scans Untuk Meningkatkan Kemampuan Eksplorasi Karier Siswa Tunarungu Di SLBN 1 Makassar Application*, SKRIPSI, 2025, XI
<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/>%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.re
senv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1
091/RED2017-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu
rbeco.2008.06.005%0Ahttps:>
- Ata, Anna, and others, 'Embracing Diversity and Inclusion in Indonesian Schools:

- Challenges and Policy Options for the Future of Inclusive Education’, *The World Bank*, 2021, pp. 1–51
- Aulianida, Dhea, Siani Indria Liestyasari, and Siti Rochani Ch, ‘Pendidikan Inklusif Dan Difabel Pembelajaran PAI’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), pp. 1689–99
- Booth, T., & Ainscow, M., *Index for Inclusion* (CSIE, 2011)
- Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development* (Harvard University Press, 1979)
- Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal* (Kencana, 2017)
- Cahyani, Leni Ambar, ‘Pendidikan Kewirausahaan Bagi Siswa Disabilitas Melalui Pembelajaran Vokasional : Analisis Pengalaman Guru’, 22 (2025), pp. 12–19
- Collins, C, ‘Medical Model VS Social Model of Disability’, *Canadian Nursing Home*, 7.3 (2024), pp. 17–20
- Creswell, John W. Creswell & J David, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 5th edn (SAGE Publications, 2018), doi:10.4324/9780429469237
- Dulisanti, Reza, ‘Penerimaan Sosial Dalam Proses Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Pada Proses Pendidikan Inklusif Di Smk Negeri 2 Malang)’, pp. 52–60
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, ed. by Routledge., 2018
- Florian, L., & Black-Hawkins, K., ‘Exploring Inclusive Pedagogy’, *Cambridge Journal of Education*, 2011
- Hidayat, dkk, ‘Transisi Kerja Lulusan Pendidikan Inklusif’, *Jurnal Pendidikan Khusus*, 2019
- Hurlock, E. B., *Developmental Psychology: A Life-Span Approach* (McGraw-Hill, 1990)
- Indonesia, SDGs, ‘Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)’, 2015 <<https://sdgs.bappenas.go.id/>>
- Kusumastuti, Frida, ‘The Application of Social Model for Handling Communication of Children With Autism’, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11.2 (2022), pp. 103–11, doi:10.14710/interaksi.11.2.103-111
- Maddrey, Hannah, ‘Evaluation of IIEP/UNICEF Online Course: “Foundations of

- Disability-Inclusive Education Sector Planning” South Asia’, no. May (2022), pp. 1–56
- Mbua, Emile Monono, ‘Principal Leadership: Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education’, *American Journal of Education and Practice*, 7.1 (2023), pp. 1–25, doi:10.47672/ajep.1313
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication, 1994, xvii
- Mintarsih, Euis, and Guru, ‘Pengelolaan Kelas Di Sekolah Inklusi’, *Jurnal Untirta*
- Mitchell, David, *What Really Works in Special and Inclusive Education* (Routledge, 2014)
- MKRI, ‘UUD 1945’, 105.3 (1945), pp. 129–33
 <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>>
- National Council on Disability, ‘The Rehabilitation Act: Outcomes for Transition-Age Youth’, 2008, p. 132
- NATIONS, UNITED, ‘10 Years of Convention on the Rights of Persons With Disabilities’, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 35.3 (2017), pp. 152–57, doi:10.1177/0924051917722294
- Nursyamsudin, and Suyudi Suhartono, ‘Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sma’, *Direktorat Sekolah Menengah Atas*, 2021, p. 36
 <<https://www.slideshare.net/khairunnisamohammad1/literasi-dan-numerasi-linus>>
- OECD, ‘Succeeding in the Labour Market: Inclusive Education and Vocational Training’, 2010
- Oliver, M, *The Politics of Disablement* (Macmillan, 1990)
- Panjaitan, Roimanson, *Metodologi Penelitian, Jusuf Aryani Learning*, 2017
- Parliamentary and Health Service Ombudsman, ‘Introduction to the Social and Medical Models of Disability’, 2023, p. 4
 <http://www.ombudsman.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/33337/FDN-218144-Introduction-to-the-Social-and-Medical-Models-of-Disability.pdf>
- Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2021, ‘Penyandang Disabilitas’, 3.5 (2021), p. 6
- Permendiknas, ‘Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa', 2009, p. 19

Poerwanti, Desy Rismayanti dan Endang, 'Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMKN 2 Malang', *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2020

PPRI 17 TAHUN 2010, 'Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan', 9.1 (2010), pp. 76–99

Pramesworo, Ignatius Septo, Muhammad Ni'amul Hanif, and Yeyen Herlina, 'Efektivitas Pendekatan Pembelajaran Inklusif Dalam Pendidikan Umum: Tinjauan Literatur Terbaru', *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11.1 (2025), pp. 1–9

Qomariah, Nurul Hidayanti, Lina Revilla Malik, and Imma Syakiro, 'Strategi Penyesuaian Kurikulum Inklusi Melalui Pendekatan Fleksibel Dan Adaptif', 5 (2025), pp. 1890–99

Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya (Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc.)', 2010, pp. 1–145

Rahardjo, Mudjia, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 3.1 (2017), p. 43
<<http://doi.org/10.1080/16070658.2018.1448503%0Awww.udsspace.uds.edu.gh%0Ahttps://doi.org/10.1080/20469047.2017.1409453%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2017.e00298%0Ahttp://www.gainhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ghana-Development-of-Food-based>>

Rahardjo, Mudjia, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2010, p. 191

Ristek, Kemendikbud, 'Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif', *Kepala Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2022, pp. 1–44
<<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>>

Rohman, Yani Fathur, 'Eksklusi Sosial Dan Penyandang Penglihatan Akses Pekerjaan', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01.01 (2019), pp. 51–66 <www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS>

Setiawan, Endry, and others, 'Pemerataan Akses Pendidikan', *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2.4 (2024)

Setiyarini, Tri, and Ade Gafar Abdullah, 'Approaches to Training People with Disability in Mainstream Vocational Training Centers', *Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in Engineering and Vocational Education (ICIEVE 2021)*, 651.Icieve 2021 (2022), pp. 62–68, doi:10.2991/assehr.k.220305.013

- Stubbs, Sue, 'Inclusive Education Where There Are Few Resources', *The Atlas Alliance*, 2008, pp. 1–138 <Co-ordinator@iddc.org.uk /July 2002%0AAlih>
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (ALFABETA, 2013)
- Sunardi, dkk, 'Manajemen Pendidikan Inklusif', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Balitbang Kemendikbud*, 2011
- UNESCO, *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*, 2017
- UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All* (UNESCO, 2020)
- UNESCO, *Inclusion and Education All Maen All, Inclusive Education Across Cultures: Crossing Boundaries, Sharing Ideas*, 2020
- UNESCO, 'Policy Guidelines on Inclusion in Education', 17 (2009), p. 302
- UNESCO, 'Training Manual For Meaningful Inclusion of Person With Disabilities', *UNESCO Cluster Office For the Carribbean, United Nations House*, no. October (2021)
- UURI, 'UURI No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', 2016
- Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, p. 5
- Wehman, P., 'Transition from School to Work: New Challenges and Goals for Rehabilitation', *Rehabilitation Counseling Bulletin*, 49(4) (2006), pp. 175–178
- Wehman, Paul, *Life Beyond the Classroom: Transition Strategies for Young People with Disabilities* (Paul H. Brookes Publishing, 2013)
- WHO, 'Towards a Common Language for Functioning , Disability and Health ICF', *International Classification*, 1149 (2002), pp. 1–22
<<http://www.who.int/classifications/icf/training/icfbeginnersguide.pdf>>
- Wildenowi, Alya Rosa, *Efektivitas Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Masa Pandemi Covid 19*, 2021, XIX
- Zaks, Zosia, 'Changing the Medical Model of Disability to the Normalization Model of Disability: Clarifying the Past to Create a New Future Direction', *Disability and Society*, 39.12 (2024), pp. 3233–60, doi:10.1080/09687599.2023.2255926
- Zulfa, Anna Nisrina, 'Kurikulum Berbasis Keterampilan Hidup:Menyiapkan Siswa Berkebutuhan Khusus Menuju Kemandirian', 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Malang



Wawancara Humas SMKN 2 Kota Malang



Wawancara Koordinator Pendidikan Inklusif



Ruang Kelas Jurusan Perhotelan



Kerjasama Dunia Industri



Kegiatan Praktek Jurusan

Lampiran Surat Izin Survey dan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG
(KOTA MALANG – KOTA BATU)**
Jalan Anjasmoro Nomor 40, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
Telepon/Faksimile (0341) 353155, Pos-el cabdinmalangbatu@gmail.com

Malang, 25 September 2025

Nomor : 421.6/2662/101.6.10/2025 Kepada,
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Kepala SMKN 2 Malang
Lampiran : Rekomendasi Ijin Penelitian di
Malang

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: 2842/Un.03.1/TL.00.1/09/2025 Tanggal 22 September 2025 perihal Permohonan ijin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : **DINDA NUR MAULIDIA**
NIM : 220106110033
Prodi / Jurusan : S1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Skripsi : Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksebelitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Malang

Dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang – Kota Batu) memberikan ijin penelitian yang dilaksanakan secara offline pada tanggal 1 Oktober 2025 s.d 1 November 2025 di SMKN 2 Malang dengan syarat tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Malang
(Kota Malang - Kota Batu)



Dr. Hj. Hastini Ratna Dewi, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196906302003122004

Tembusan:

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Dinda Nur Maulidia

- UU ITE no 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id>, email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : 2832/Un.03.1/TL.00.1/09/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Izin Survey**

22 September 2025

Kepada

Yth. Kepala SMKN 2 Kota Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal Skripsi pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Dinda Nur Maulidia
NIM : 220106110033
Tahun Akademik : Ganjil - 2025/2026
Judul Proposal : **Kebijakan Pendidikan Inkusif dalam Aksebilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SMKN 2 Kota Malang**

Diberi izin untuk melakukan survey/studi pendahuluan di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Muhammad Walid, MA
19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Ketua Program Studi MPI
2. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
MALANG



1. Jl. Veteran No. 17, ☎ (0341) 551504, 📠 (0341) 551504 Kode Pos.
65145

Website : <http://www.smkn2malang.sch.id> | Email : smkn2malang@yahoo.com

PENELUSURAN ALUMNI
SISWA PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIFI SMK NEGERI 2
MALANG

No.	Nama	Jurusan	Kegiatan
1.	Auliya Diena Mahfuzah	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
2.	Doni Febrianto	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
3.	Dani Maulana	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
4.	Renaldy Pramadanianta	AP	Membuka peternakan ayam
5.	Najihul Ulum	TKJ	Melanjutkan kuliah (UB)
6.	Barnabas Deny Bintang P	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
7.	Jenny Nilamsari P	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
8.	Zulfikar Anggoro P	AP	Melanjutkan kuliah (UB)
9.	Tendri Meydina H	TKJ	Melanjutkan kuliah (UB)
10.	Benedictus Venus II	AP	Les fotografi
11.	Feri Adi Santoso	AP	Karyawan rumah makan
12.	Novandra Riski Dianto	AP	Membantu orang tua di rumah
13.	Trianto Wicaksono	AP	Membuka laundry
14.	Tio Atma Nugraha	TKJ	Melanjutkan kuliah (UB)
15.	Agam Rimaldy	AP	Membantu orang ua di rumah
16.	Alfredho Manopo Wangke	AP	Menjual pulsa dan pembayaran online
17.	Andre Priambodo Harjito	AP	Safana Hotel – House Keeping
18.	Lazardhi Septian Djatmiko	AP	Kuliah (UM)
19.	Moch. Arif Habibullah	AP	Embantu orang tua di rumah
20.	Muh. Rahadian Mustamsir	AP	Mengikuti seleksi mhasiswa baru (UB)
21.	Rizal Ilham Ramadhan	AP	Membantu rang tua di rumah
22.	Rosyidah Indah P	AP	Melanjutkan kuliah (UB)

23.	Muhammad Lano	TKJ	Melanjutkan kuliah (UB)
24.	Resangga Helmy Priadana	TKJ	Melanjutkan kuliah (IKIP Jember)
25.	Dwitra Agus Priantoro	AP	Kuliah (UB)
26.	Fahmi Firdaus	AP	Bengkel
27.	Firqhi Izdihar Q	AP	Kuliah (UB)
28.	Kartiko Widya H	AP	Kuliah (UNMER)
29.	Setyo Brahmanto W	AP	Membuka SPBU mini
30.	Yani Rista F	AP	Karyawan sablon
31.	Boby Ariesta	TKJ	Karyawan rumah makan, Kuliah (UB)
32.	Deby Shinta Dewi	TKJ	Kuliah (UNEJ)
33.	M. Aruzal Geovany	TKJ	Kuliah (POLTEKOM)
34.	Ni Putu Ayu N. E	TKJ	Kuliah (POLTEKOM)
35.	M. Firhan Irzha	AP	Membantu orang tua
36.	Kevin Andinata	AP	Membantu orang tua
37.	Deo Alvandrey	AP	Karyawan Airy Room
38.	Ivan Wirandana	AP	Membantu orang tua
39.	R Hendra satria W	AP	Kuliah (UB)
40.	Yasmine Aleva	AP	Membantu orang tua



SMKN 2 MALANG

PROGRAM KERJA
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF
SMKN 2 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019



NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	PELAKSANAAN	PEBIAYAAN		WAKTU PELAKSANAAN		INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
					SUMBER	BIAYA (Rp)	Bulan	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Observasi Calon Siswa Baru	Mengetahui karakteristik calon siswa baru sehingga dapat menyerap calon siswa yang sesuai dengan potensi, bakat, minat serta kesesuaian dengan jurusan yang ada di sekolah	Calon Siswa Baru	GPK	Komite Sekolah	-	-	-	- Adanya Daftar Hadir - Adanya alat tes observasi	-
2.	Sosialisasi Program Pendidikan Inklusif dan siswa ABK pada siswa baru reguler	Memberikan wawasan kepada siswa baru tentang apa itu ABK dan program inklusif yang ada di SMKN 2 Malang	Siswa reguler	GPK bekerjasama dengan guru BK	Komite Sekolah	-	-	-	- Adanya Laporan Hasil Sosialisasi	-
3.	Observasi kemampuan akademik dan perilaku mandiri siswa di kelas	Mengetahui sejauh mana kemampuan adaptasi, akademik, dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa ABK pada awal pembelajaran di kelas	Siswa	GPK	Komite Sekolah	-	-	-	- Adanya laporan hasil perkembangan belajar siswa	-
4.	Pembagian jam mengajar GPK	Memudahkan GPK untuk membimbing siswa dan fokus pada perkembangan siswa bimbingannya	GPK	Koordinator GPK	Komite Sekolah	-	-	-	- Adanya pembagian jam mengajar GPK	-
4.	Psikotes	Mengevaluasi hasil IQ dan kondisi psikologis siswa secara berkala	Siswa	GPK	Komite Sekolah	-	-	-	- Adanya Daftar Hadir - Adanya hasil psikotes	-

5.	Outbond	Memberikan relaksasi dan refreshing serta reward kepada siswa ABK yang telah belajar dengan baik	Guru dan Siswa	GPK	Komite Sekolah	-	-	- Adanya Daftar Hadir	-
6.	Pertemuan Dengan Orang Tua Murid	Mengkomunikasikan perkembangan belajar siswa selama di sekolah	Orang Tua Siswa	GPK	Komite Sekolah	-	-	- Adanya Daftar Hadir	-

Disahkan,

Kepala Sekolah



H. BAGUS GUNAWAN, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP.19590314 198703 1 006

Malang, 7 Juli 2018

Disusun Oleh

Koordinator Program Pendidikan Inklusif

Eli Ermawati, S.Pd

**RENCANA KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SMKN 2 MALANG
TAHUN 2021**

No	Rencana Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Psikotes	Januari	- Psikolog, ATK
2.	Praktek membuat makanan sederhana (cup cake)	Februari	- Bahan habis pakai
3.	Kunjungan orang tua	Maret	- Transport, ATK
4.	Praktek House Keeping	April	- Alat kebersihan, bahan habis pakai
5.	Penyusunan Akomodasi Kurikulum	April	- Konsumsi, transport, ATK
6.	Praktek membuat ayam goreng/ayam pok-pok ide jualan	Mei	- Bahan habis pakai
7.	Outbond	Juni	- Transportasi, tiket, konsumsi, trainer
8.	PPDB	Juni	- Format pendaftan, ATK
9.	Identifikasi dan assesment siswa berkebutuhan khusus	Juli	- Format assesment, ATK
10.	Praktek menyusun bucket bunga	Agustus	- Bahan habis pakai
11.	Kunjungan industri	September	- Transportasi, konsumsi
12.	Praktek Laundry	Oktober	- Bahan habis pakai
13.	Praktek membuat salad buah dan kentang goreng aneka rasa	November	- Bahan habis pakai

Malang, Juli 2020

Kepala SMK Negeri 2 Malang
Khusus

Koordinator Guru Pembimbing

Drs. HARI MULYONO, MT
Pembina
NIP. 19680625 199512 1 0

Eli Ermawati, S.Pd

No	Fokus Penelitian	Informan	Metode			Wawancara		Observasi	Dokumentasi
			W	O	D	Indikator	Pertanyaan		
1.	Bagaimana Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksesibilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	1. Kepala Sekolah 2. Humas	✓	✓	✓	Dasar dan Regulasi Pendidikan	1. Apa dasar hukum atau regulasi yang digunakan sekolah dalam merumuskan kebijakan inklusi terkait akses dunia kerja? 2. Apakah terdapat dokumen atau SOP khusus yang mengatur penempatan pendampingan ABK di dunia industri?	1. Pembelajaran dikelas 2. Praktek Kerja 3. Fasilitas Pendukung Program Inklusi	1. Rencana Kegiatan Program Inklusi 2. Program Tahunan Kerja 3. Profil Inklusi 4. Assesmen Perkembangan dan Akademik
						Perencanaan Program Vokasional	1. Bagaimana sekolah merancang program pelatihan vokasional untuk mempersiapkan ABK memasuki dunia kerja?		
						Akomodasi dan Penyesuaian	1. Apa saja bentuk akomodasi layak yang diberikan sekolah kepada ABK dalam pembelajaran dan praktik industri?		
						Kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI)	1. Bagaimana strategi sekolah dalam membangun kerja sama dengan industry yang bersedia menerima ABK? 2. Apakah terdapat kendala dari pihak industri dalam menerima ABK untuk PKL atau bekerja?		
						Pendampingan dan Transisi ke Dunia Kerja	1. Bentuk pembekalan apa yang diberikan kepada ABK sebelum memasuki dunia kerja atau PKL?		
						Dampak Kebijakan	1. Bagaimana sekolah mengevaluasi keberhasilan kebijakan inklusif dalam akses dunia kerja bagi ABK? 2. Apa tantangan dalam menjalankan pendidikan inklusif		
2.	Bagaimana Implementasi Kebijakan	1. Kepala Sekolah 2. Humaas	✓	✓	✓	Pelaksanaan Program Persiapan	1. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan vokasional bagi ABK dalam mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja?		1. RPP Surat lamaran Pekerjaan

	Pendidikan Inklusif dalam Aksebilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus?	3. Koordinator Pendidikan Inklusif 4. Guru GPK				Penerapan RPI dan Penyesuain Kurikulum	1. Bentuk penyesuaian apa yang dilakukan dalam pembelajaran vokasional untuk mendukung kompetensi kerja ABK?		2. Lampiran bahan Instrumen Identifikasi 3. Program Kerja Inklusi 4. Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
						Pendampingan dan Monitoring	1. Bagaimana pendampingan yang diberikan kepada ABK sebelum dan selama PKL?		
						Kerjasama dengan Dunia Industri	1. Bagaimana proses penempatan ABK di dunia industri dilakukan?		
						Hambatan dan Solusi Implementasi	1. Apa hambatan utama dalam implementasi kebijakan inklusif untuk akses dunia kerja ABK? 2. Bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut?		
3.	Apa Dampak dari Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Aksebilitas Dunia Kerja bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus?		✓	✓	✓	Dampak terhadap ABK	1. Bagaimana kebijakan pendidikan inklusif mempengaruhi kesiapan kerja dan kompetensi vokasional peserta didik ABK?		
						Dampak terhadap Sekolah	1. Bagaimana kebijakan inklusif mempengaruhi sistemana layanan dan koordinasi sekolah dalam me mpersiapkan ABK ke dunia kerja? 2. Apa dampak kebijakan ini terhadap beban kerja, kesiapan SDM dan penyediaan sarana prasarana di sekolah?		
						Dampak terhadap DI/DU	1. Apakah terdapat perubahan presepsi atau kebijakan internal DI/DU terkait penerimaan tenaga kerja ABK?		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dinda Nur Maulidia

Tempat, Taggal lahir : Probolinggo, 11 April 2004

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Tahun Masuk : 2022

Alamat Rumah : Jl Kapuran No. 100 RT/RW 13:07 Dusun
Cempaka, Desa Pondok Kelor, Kec.Paiton, Kab.
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

No. Telepon : 088217906225

Email : 220106110033@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan : RA Raudhlatul Ahfal
: MI Misbahul Huda
: MTsN 1 Probolinggo
: MAN 2 Kota Probolinggo